



TW I 2024

Laporan Kinerja BBRSEKP



**Kementerian Kelautan dan Perikanan
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan
Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
2024**



TW I 2024

Laporan Kinerja BBRSEKP



**Kementerian Kelautan dan Perikanan
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan**

**Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
2024**

TIM PENYUSUN

Pembina

Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

(Dr. A. Rita Tisiana Dwi Kuswardani, M.T)

Penanggung Jawab

Ketua Kelompok Pengelolaan Kinerja

(Fenni Eddrisea, M.Si)

Anggota

Nurma Yunita D, S.E

Andakoro Yoga P, S.I.Kom

Kontributor

Kepala Sub Bagian Umum

Kelompok Kerja Perencanaan

Kelompok Kerja Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan

Kelompok Kerja Penyelenggaraan Sistem Manajemen SDMA

Kelompok Kerja Public Sharing Sosial Ekonomi KP

Kelompok Kerja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Kelompok Kerja Online Journal Publishing Sosial Ekonomi KP

Kelompok Kerja Tata Kelola Pemerintahan yang Baik



KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kepada Allah SWT atas limpahan karunia dan rahmat-NYA sehingga Laporan Kinerja Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBRSEKP) triwulan I tahun 2024 dapat disusun dan diselesaikan tepat waktu. Laporan ini merupakan perwujudan tanggung jawab atas kinerja dan pencapaian visi dan misi BBRSEKP selama periode triwulan I tahun 2024, dengan metode penyajian mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Laporan Kinerja BBRSEKP triwulan I tahun 2024 mempunyai beberapa fungsi antara lain memberikan informasi kinerja yang terukur atas capaian selama periode triwulan I tahun 2024 dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BBRSEKP dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerja. Kinerja BBRSEKP diukur atas dasar penilaian indikator Kinerja (IK) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan (SK) sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) BBRSEKP tahun 2024 yang merupakan kontrak kinerja tahunan.

Selanjutnya, laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara utuh atas capaian kinerja pelaksanaan tugas serta bermanfaat sebagai umpan balik bagi seluruh pegawai BBRSEKP dalam meningkatkan kinerja pada tahun berikut. Akhirnya, disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas kontribusi semua pihak yang mendukung pencapaian kinerja BBRSEKP selama triwulan I tahun 2024. Semoga laporan kinerja ini juga memberikan manfaat dan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya.

Jakarta, 25 April 2024

Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan



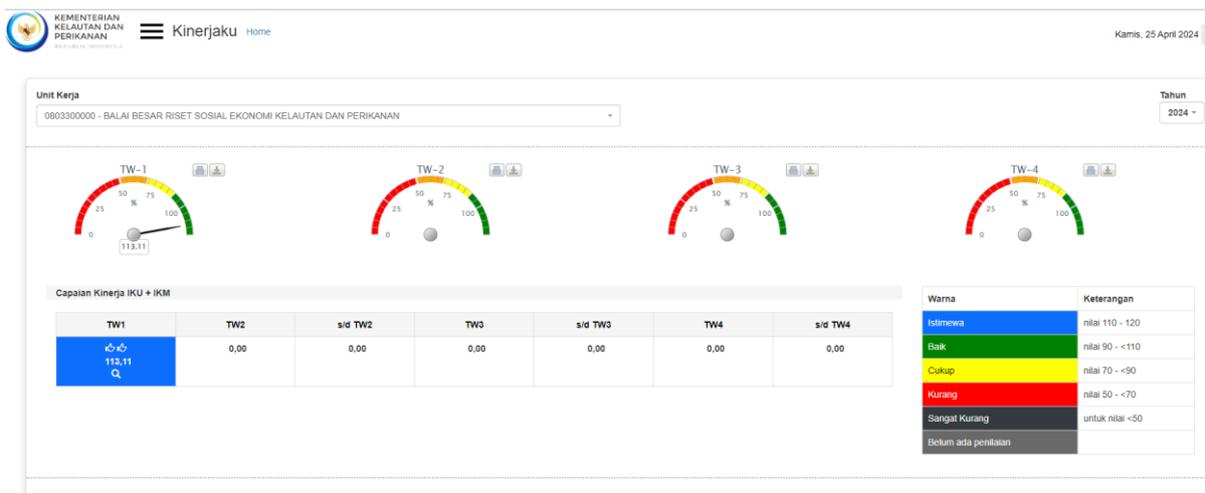
Dr. A. Rita Tisiana Dwi Kuswardani, M.T

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) ini merupakan gambaran capaian kinerja BBRSEKP sepanjang triwulan I tahun 2024 sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Penyusunan laporan ini sebagai bentuk pertanggung jawaban dan transparansi informasi atas kinerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi utama, mengelola keuangan dan implementasi SAKIP di lingkungan BBRSEKP pada Tahun 2024.

Pada triwulan I tahun 2024 BBRSEKP telah menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) yang akan dicapai pada akhir tahun dengan dukungan anggaran Rp. 12.300.000.000.-, guna mencapai target - target yang telah ditetapkan pada 2 (dua) Sasaran Kegiatan (SK) dengan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja (IK). Hasil pengukuran kinerja dari aplikasi kinerjaku.kkp.go.id diperoleh data capaian kinerja BBRSEKP pada triwulan I tahun 2024 sebesar **113,11 %** sebagaimana dashboard kinerjaku sebagai berikut:

Gambar 1. Capaian Kinerja pada Dashboard Kinerjaku BBRSEKP TW I Tahun 2024



Selama triwulan I tahun 2024 dari 20 IK BBRSEKP, terdapat 7 IK berstatus istimewa (biru), dan terdapat 1 IK berstatus baik (hijau) dan 1 berstatus cukup (kuning), serta untuk indikator lain akan di ukur di triwulan berikutnya . Rincian target dan realisasi 9 IK tersebut adalah:

1. Persentase Peningkatan Kapasitas SDM BBRSEKP (%) dengan target sebesar 15% dengan capaian sebesar 16.67% atau sama dengan 111,13%
2. Persentase Dokumen Bahan Pimpinan yang Dimanfaatkan (%) dengan target sebesar 65% dan capaian sebesar 100% atau sama dengan 120%

3. Persentase Efektifitas penyebarluasan informasi kegiatan Sosial Ekonomi KP (%) dengan target sebesar 60% dan capaian sebesar 152% atau sama dengan 120%
4. Kerjasama Eselon I yang ditindaklanjuti oleh BBRSEKP (Paket) dengan target sebesar 2 paket dan capaian sebesar 3 paket atau sama dengan 120%
5. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar BBRSEKP (%) dengan target sebesar 94% dan capaian sebesar 133,33% atau sama dengan 120%
6. Persepsi Kepuasan Layanan Publik Sosial Ekonomi KP (Nilai) dengan target senilai 75 dan capaian senilai 89.58 atau sama dengan 119,44%
7. Persentase Realisasi Anggaran BBRSEKP (%) dengan target sebesar 15% dan capaian sebesar 21.29% atau sama dengan 120%
8. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRSEKP (%) dengan target sebesar 82% dan capaian sebesar 71.43% atau sama dengan 87.11%
9. Layanan Perkantoran BBRSEKP (%) dengan target sebesar 100% dan capaian sebesar 100% atau sama dengan 100%

Secara umum, pencapaian kinerja BBRSEKP adalah baik. Hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja, yang dapat tercapai semuanya, bahkan beberapa melebihi target yang ditetapkan serta realisasi anggaran yang tinggi.

Dari sisi akuntabilitas keuangan, realisasi anggaran BBRSEKP selama triwulan I Tahun 2024 sebesar Rp. 2.363.744.548,- dari pagu anggaran Rp. 12.300.000.000,-. Dengan demikian, pencapaian kinerja output BBRSEKP dapat tercapai dengan dukungan anggaran sebesar 21.29% dari pagu.

Jika dilihat berdasarkan Sasaran Kegiatan (SK), maka satu dari dua SK tercapai melebihi target atau **“ISTIMEWA”**, yaitu “Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker” (113,11%); Capaian kinerja satu SK lainnya masuk kategori **“Belum Terdapat Penilaian”** yaitu Tersedianya Perumusan Kebijakan KP yang digunakan untuk Penyusunan Kegiatan.

Guna mewujudkan kinerja yang optimal dan memenuhi target yang telah ditetapkan, sejumlah catatan perlu mendapat perhatian diantaranya :

1. **IK Dengan Target Kinerja Tahunan**

Indikator Kinerja yang memiliki target triwulanan maupun tahunan tetap harus dimonitor perkembangan pelaksanaan kegiatannya. Penanggung jawab IK agar memastikan bahwa capaian akhir tahun dapat dicapai dengan baik sesuai target yang telah ditetapkan terutama terkait IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk

Perbaikan Kinerja BBRSEKP (%) untuk dapat segera dilakukan percepatan penyelesaian tindak lanjut temuan.

2. Verifikasi Capaian

Dalam rangka akuntabilitas atas capaian IK, kegiatan verifikasi perlu dilakukan secara berkala guna memastikan bahwa capaian yang diklaim sesuai bukti dukung yang ada. Disamping itu, verifikasi penting dilaksanakan agar pengukuran dan pelaporan kinerja dapat dilakukan secara disiplin dan tepat waktu.

3. Pelaporan Kinerja

Dalam rangka akuntabilitas atas implementasi SAKIP, kegiatan penyusunan laporan kinerja perlu disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dimana harus terdapat unsur perbandingan antar satker sejenis K/L dan sebagai tindak lanjut rekomendasi atas penilaian SAKIP ditahun sebelumnya, dengan memastikan tim pengelola/penyusun laporan kinerja untuk menyajikan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level kementerian/level unit kerja lingkup BPPSDMKP pada laporan kinerja tahunan.

Capaian kinerja diharapkan lebih baik dari tahun sebelumnya, atau target tahun berikutnya lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Tingkat kepatuhan dalam menyampaikan data dukung juga perlu ditingkatkan melalui mekanisme penyampaian data capaian sekaligus dilengkapi dengan bukti data dukung capaian.

Akhirnya, Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh pegawai maupun stakeholders BBRSEKP. Akhirnya, BBRSEKP berharap dapat terus meningkatkan kontribusi untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat KP.

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja BBRSEKP Triwulan I Tahun. 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target TW I 2024	Capaian TW I 2024	% Capaian
1	Tersedianya Perumusan Kebijakan KP yang digunakan untuk Penyusunan Kegiatan	1 Hasil Perumusan Kebijakan Responsif KP yang digunakan untuk Penyusunan Kebijakan (Rekomenjak)	-	-	-
2	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	2 Indeks Profesional ASN Lingkup BBRSEKP (Indeks)	-	-	-
		3 Persentase Peningkatan Kapasitas SDM BBRSEKP (%)	15	16,67	111,13
		4 Persentase Dokumen Bahan Pimpinan yang Dimanfaatkan (%)	65	100	120
		5 Persentase Efektifitas penyebarluasan informasi kegiatan Sosial Ekonomi KP (%)	60	152	120

		6	Kerjasama Eselon I yang ditindaklanjuti oleh BBRSEKP (Paket)	2	3	120
		7	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar BBRSEKP (%)	94	133,33	120
		8	Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja BBRSEKP	-	-	-
		9	Persepsi Kepuasan Layanan Publik Sosial Ekonomi KP	75	89,58	119,44
		10	Nilai IKPA BBRSEKP (Nilai)	-	-	-
		11	Nilai Kinerja Anggaran BBRSEKP (Nilai)	-	-	-
		12	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Balai Besar Riset Sosial Ekonomi KP (Nilai)	-	-	-
		13	Nilai PM SAKIP BBRSEKP (Nilai)	-	-	-
		14	Persentase Realisasi Anggaran BBRSEKP (%)	15	21,29	120
		15	Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK atas LK BBRSEKP Dibandingkan Realisasi Anggaran BBRSEKP (%)	-	-	-
		16	Jurnal Sosial Ekonomi yang Ter-akreditasi (Indeks Jurnal)	-	-	-
		17	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan BBRSEKP yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	82	71,43	87,11
		18	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Mempertahankan Predikat WBK/WBBM yang Lolos Penilaian Menuju Wilayah Bebas Korupsi (Nilai)	-	-	-
		19	Persentase Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BBRSEKP (%)	-	-	-
		20	Layanan Perkantoran BBRSEKP (%)	100	100	100

DAFTAR ISI

Tim Penyusun	iii
Kata Pengantar	iv
Ringkasan Eksekutif	v
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar	xii

Bab I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Tujuan	3
1.3. Tugas dan Fungsi	4
1.4. Keragaan SDM	5
1.5. Potensi dan Permasalahan	6
1.6. Sistematika Laporan	9

Bab II Perencanaan Kinerja	12
2.1 Rencana Strategis	12
2.2 Rencana Kerja Tahunan	18
2.3 Perjanjian Kinerja	18
2.4 Pengukuran Kinerja	20

Bab III Akuntabilitas Kinerja	21
3.1. Capaian Kinerja BBRSEKP TW I Tahun 2024	21
3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja	23
3.3. Realisasi Keuangan	52
3.4. Analisis Efisiensi Anggaran	56

Bab IV Penutup	57
4.1 Kesimpulan	57
4.2 Permasalahan dan Rekomendasi	59

Lampiran

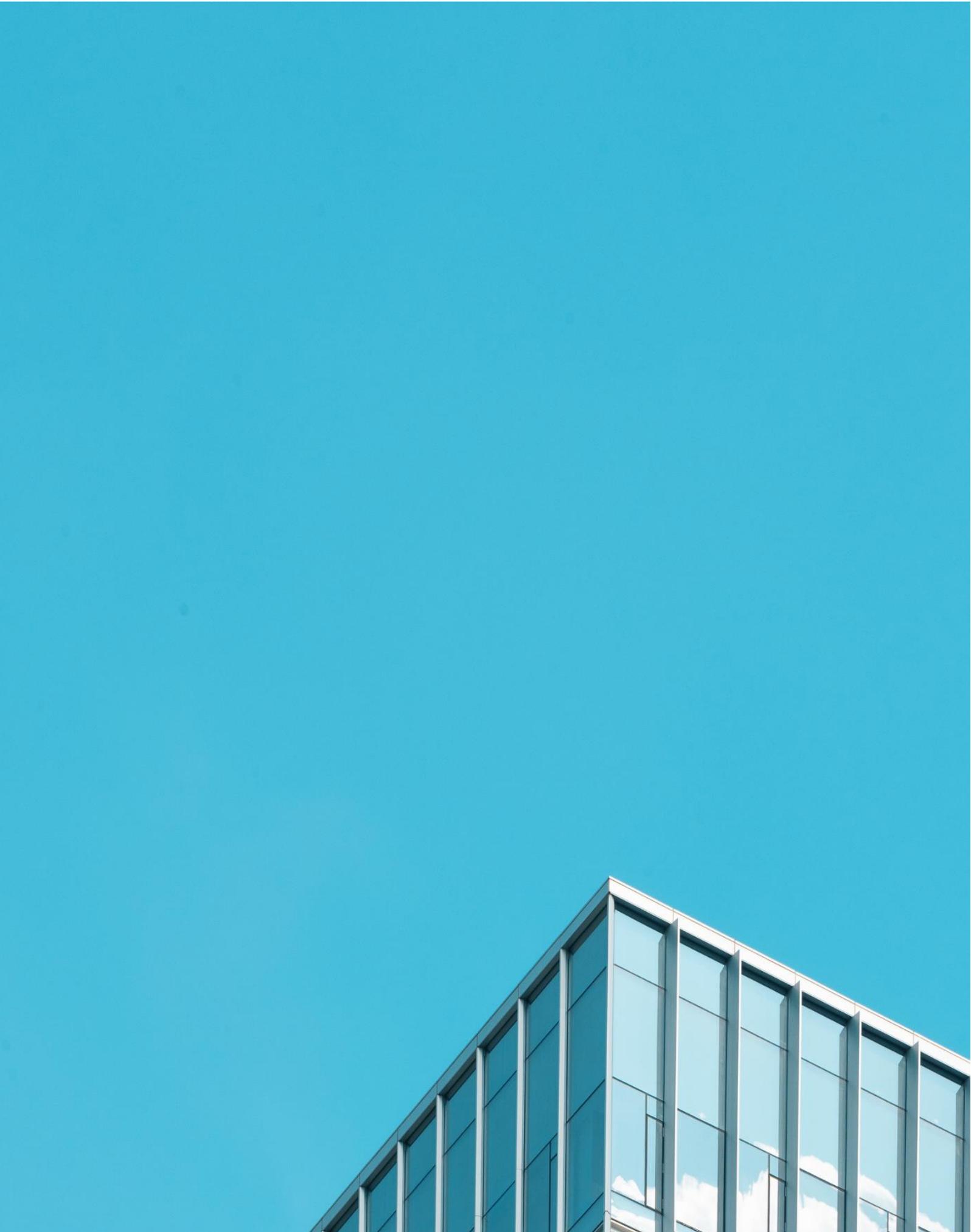
- Perjanjian Kinerja
- Penghargaan BBRSEKP

Daftar Tabel

1	Capaian Indikator Kinerja BBRSEKP Triwulan I Tahun. 2024	viii
2	Keterkaitan Visi, Misi dan Tujuan dalam Renstra BBRSEKP 2020-2024	15
3	Rencana Kerja BBRSEKP TW I Tahun 2024	17
4	Perjanjian Kerja BBRSEKP TW I Tahun 2024	18
5	Capaian Kerja BBRSEKP TW I Tahun 2024	23
6	Penyesuaian Bobot Kualifikasi IP ASN	25
7	Penyesuaian Bobot Kompetensi IP ASN	26
8	Penyesuaian Bobot Kinerja IP ASN	26
9	Penyesuaian Bobot Disiplin IP ASN	26
10	Capaian IK Persentase Peningkatan Kapasitas SDM BBRSEKP (%)	27
11	Capaian IK Persentase Dokumen Bahan Pimpinan yang Dimanfaatkan	29
12	Capaian IK Persentase Efektifitas penyebarluasan informasi kegiatan Sosial Ekonomi KP (%)	31
13	Capaian IK Kerjasama Eselon I yang ditindaklanjuti oleh BBRSEKP (Paket)	32
14	Kerjasama Eselon I yang ditindaklanjuti oleh BBRSEKP	32
15	Perbandingan Capaian IK 6 dengan satker sejenis	33
16	Perubahan pengukuran indikator MP	35
17	Capaian IK Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar BBRSEKP (%)	35
18	Perbandingan Capaian IK 6 dengan Satker Sejenis	36
19	Capaian IK 9 Persepsi Kepuasan Layanan Publik Sosial Ekonomi KP (Nilai)	39
20	Capaian IK 14 Persentase Realisasi Anggaran BBRSEKP (%)	43
21	Capaian IK 17 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRSEKP (%)	47
22	Perbandingan Capaian IK 17 dengan satker sejenis	48
23	Capaian IK 20 Persentase Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	51
24	Perbandingan Capaian IK 20 dengan satker sejenis	51
25	Capaian Pagu dan Realisasi Anggaran Perjenis Belanja TW I Tahun 2024	52
26	Capaian Pagu dan Realisasi Anggaran per Sasaran TW I Tahun 2024	52
27	Capaian Pagu dan Realisasi Anggaran per IK TW I Tahun 2024	53
29	Rincian target dan realisasi atas 20 IK	58

Daftar Gambar

1	Capaian Kinerja pada Dashboard Kinerja BBRSEKP Tahun 2024	V
2	Struktur Organisasi BBRSEKP	5
3	Rincian PNS BBRSEKP	6
4	Komposisi Pegawai BBRSEKP	6
5	Peta Strategis Kegiatan BBRSEKP 2024	16
6	Dashboard Kinerja BBRSEKP Tahun 2024	22
7	Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 2	27
8	Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 3	28
9	Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 4	30
10	Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 5	32
11	Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 6	34
12	Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 7	36
13	Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 8	37
14	Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 9	39
15	Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 10	40
16	Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 11	41
17	Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 12	41
18	Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 13	43
19	Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 14	44
20	Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 15	45
21	Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 16	46
22	Data Rekapitulasi Capaian IKU 16	47
23	Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 17	48
24	Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 18	49
25	Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 19	50
26	Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 20	52
27	Sebaran Realisasi BBRSEKP berdasarkan Variabel Pengeluaran	55
28	Pagu dan Realisasi Anggaran berdasarkan Klasifikasi Rincian Output (KRO) BBRSEKP TW I Tahun 2024	55
29	Sebaran Kategori Pelaksanaan Kegiatan dan Pemanfaatan pada BBRSEKP Tahun TW I Tahun 2024	56



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Tujuan

1.3 Tugas Dan Fungsi

1.4 Keragaan SDM

1.5 Potensi dan Permasalahan

1.6 Sistematika Laporan Kinerja



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBRSEKP) merupakan salah satu unit kerja eselon II pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang bertanggung jawab kepada Badan Penyuluhan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP). BBRSEKP menurut PERMEN KP No.72/PERMEN-KP/2020, menjadi unit kerja yang memiliki tugas dalam melaksanakan penelitian di bidang sosial ekonomi, budaya, dan kelembagaan, sistem usaha, pemasaran dan perdagangan, analisis, dan pengembangan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan. Sebagai unit kerja yang bertanggung jawab kepada lingkup Eselon I yaitu BPPSDM KP, maka BBRSEKP memiliki suatu kewajiban dalam melaksanakan pelaporan akuntabilitas kinerja.

Sesuai dengan hal diatas, maka kewajiban tersebut dilaksanakan dengan dasar Peraturan Presiden Nomor: 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada peraturan tersebut menyebutkan bahwa setiap unit kerja diwajibkan untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi; dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) pada setiap akhir tahun kepada Menteri K/L melalui Sekretariat Jenderal pada masing-masing Kementerian/Lembaga.

Bentuk implementasi tugas dan fungsi BBRSEKP melalui pelaksanaan kegiatan penelitian dan didukung operasional kegiatan manajerial serta sarana dan prasarana. Ketiga Kegiatan tersebut menjadi komponen rencana kegiatan satker yang memiliki target output atau keluaran pada setiap tahunnya. Output yang dihasilkan merupakan indikator keberhasilan dari BBRSEKP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan perencanaan riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

Sebagai salah satu instansi dan penyelenggara negara di lingkup Badan Penyuluhan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), BBRSEKP telah menetapkan rencana kerja tahun 2024, melakukan monitoring dan evaluasi, pengukuran kinerja yang telah dicapai, serta penyusunan LKj BBRSEKP Triwulan I Tahun 2024 sebagai wujud akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang diemban BBRSEKP.

Sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Kerja TA. 2024, berupa output dukungan manajemen satker. Target output tertuang dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) BBRSEKP dan secara detail tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) BBRSEKP dengan alokasi anggaran Rp. 12.300.000.000,- dengan DIPA Petikan Satker Balai Besar Riset Sosial Ekonomi KP (403836) Nomor : SP DIPA - 032.12.2.403836/2024 tanggal 15 Maret 2024 dengan kode digital stamp DS:6108-3106-5647-4406 (Revisi 03).

Gambaran akuntabilitas pelaksanaan kegiatan pada triwulan I tahun 2024 serta keluaran atau output apa saja yang telah dihasilkan BBRSEKP dituangkan dalam laporan kinerja ini. Meskipun laporan kinerja triwulan I tahun 2024 menginformasikan kegiatan manajerial saja, berkenaan dengan masih belum ditetapkannya organisasi baru pasca tugas riset yang disatukan kedalam BRIN, namun tetap disusun sesuai kaidah aturan yang berlaku untuk dapat diketahui dan menjadi informasi bagi stakeholder terkait dan masyarakat luas.

Adapun dasar hukum penyusunan LKJ BBRSEKP triwulan I tahun 2024 adalah:

1. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor: 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
4. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor: 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan adalah:

1. Sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat di satu sisi, dan di sisi lain.
2. Sebagai alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan.
3. Sebagai umpan balik (*Feed back*) untuk perbaikan kinerja triwulan di tahun berikut

1.3 Tugas Dan Fungsi

Sesuai Peraturan Menteri KP Nomor: 72 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBRSEKP) yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penyuluhan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan memiliki tugas ***melaksanakan penelitian di bidang sosial ekonomi, budaya dan kelembagaan, sistem usaha, pemasaran dan perdagangan, analisis, dan pengembangan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan.***

Dalam melaksanakan tugasnya, BBRSEKP menyelenggarakan fungsi yang meliputi :

1. Penyusunan pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan;
2. Perumusan riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan;
3. Pelaksanaan riset dibidang ekonomi makro, inventarisasi dan tata kelola sosial ekonomi sumber daya, sistem usaha dan pemasaran produk, inkubasi bisnis dan alih teknologi, sosial budaya masyarakat, komunikasi, serta politik dan hukum kelautan dan perikanan;
4. Pelaksanaan tata laksana, sarana, dan pelayanan jasa riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan;
5. Pengelolaan data, informasi, dan publikasi hasil riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan; dan
6. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Tugas dan fungsi yang diemban tersebut merupakan salah satu indikator perubahan nomenklatur dari Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan menjadi Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Adapun dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Kepala BBRSEKP dibantu oleh Sub Bagian Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

A. Sub Bagian Umum

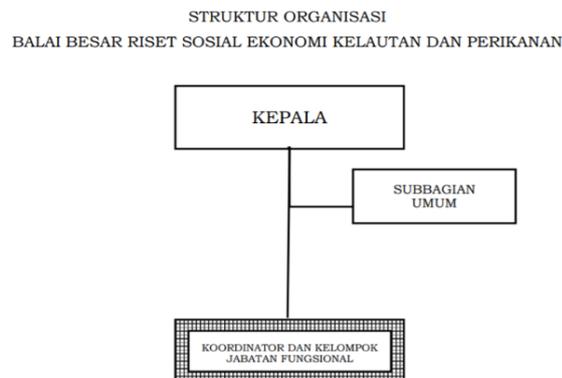
Sub bagian umum mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, persuratan, kearsipan, rumah tangga, pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan, serta pengelolaan prasarana dan sarana riset.

B. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Jabatan Fungsional menjalankan fungsi mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan masing-masing fungsional sesuai dengan bidang tugas Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan.

Adapun struktur organisasi Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan sebagaimana Peraturan Menteri Nomor 72/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, seperti terlihat pada gambar 1.



Gambar 2 . Struktur Organisasi BBRSEKP

1.4 Keragamaan SDM

“Sumber daya manusia sebagai salah satu indikator penting pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Dalam mencapai tujuannya tentu suatu organisasi memerlukan sumber daya manusia sebagai pengelola sistem, agar sistem ini berjalan tentu dalam pengelolaannya harus memperhatikan beberapa aspek penting seperti pelatihan, pengembangan, dan motivasi”

Sumber Daya Manusia (SDM) Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan ber jumlah 61 orang, terbagi dalam 5 (lima) yaitu SDM struktural, jabatan fungsional tertentu, jabatan fungsional umum, p3k, ppnpn serta tenaga outsourcing. Pada tahun 2023, kualitas SDM pada Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan diharapkan mampu mengembangkan, memperbaiki, dan memperkenalkan berbagai program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Komposisi dari pegawai yang berada di BBRSEKP, sebagai, berikut :



Gambar 3 . Rincian PNS BBRSEKP



Gambar 4 . Komposisi Pegawai BBRSEKP

1.5 Potensi dan Permasalahan

1) Potensi

Potensi BBRSEKP yang dapat dikembangkan untuk mendukung pembangunan kelautan dan perikanan melalui Kelembagaan Riset.

Kelembagaan BBRSEKP dibentuk untuk mendukung capaian agenda pembangunan nasional, pengarusutamaan pembangunan KKP, dan arah riset BPPSDM KP. Sebagai bagian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, BBRSEKP memiliki struktur organisasi dalam rangka mewujudkan efektifitas organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/Permen-Kp/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Riset Sosial Ekonomi

Kelautan dan Perikanan. BBRSEKP mempunyai tugas melaksanakan kegiatan riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan. Adapun BBRSEKP menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan riset di bidang ekonomi makro, inventarisasi dan tata kelola sosial ekonomi sumberdaya, sistem usaha dan pemasaran produk, inkubasi bisnis dan alih teknologi, sosial budaya masyarakat, komunikasi, politik dan hukum kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan tata laksana, sarana, dan pelayanan jasa riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan;
- d. pengelolaan data, informasi, dan publikasi hasil, dan monitoring dan evaluasi riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan; dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan ini dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional mengalami perubahan yang cukup signifikan. Dampaknya pada Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 adalah program dan kegiatan terkait riset sudah tidak dapat dilaksanakan.

Program riset pada BBRSEKP bertransformasi menjadi kegiatan Analisis Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan yang ditanggungjawab oleh Tim Kerja Analis Kebijakan Sosial Ekonomi (Ansos), yang mana hal ini merupakan eksekusi dari perubahan organisasi yang sangat dinamis. Kegiatan yang dilakukan secara fungsi masih berupa kegiatan yang mendukung program kegiatan di lingkup eselon 1 kementerian, merupakan kegiatan menganalisa suatu topik atau rencana program dan memberikan rekomendasinya. Tim kerja ini melakukan kegiatan yang mendukung seluruh program BPPSDMKP dan program prioritas KKP.

Dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good governance*) serta mewujudkan pelayanan publik yang baik, efisien, efektif dan berkualitas tentunya perlu didukung adanya SDM yang profesional, bertanggung jawab, adil, jujur dan memiliki kompetensi di bidangnya. Pengembangan SDM yang berbasis kompetensi merupakan suatu keharusan agar organisasi dapat mewujudkan suatu kinerja yang lebih baik dan pelayanan publik yang lebih optimal. Untuk mewujudkan SDM yang profesional dan kompeten khususnya dapat dilakukan melalui pembinaan karir dengan perpaduan antara sistem prestasi kerja dan sistem karir.

Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Pengukuran tingkat profesionalitas ASN diukur melalui dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Dimensi kualifikasi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah. Dimensi kompetensi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi (diklat, seminar, *workshop*) yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan. Dimensi Kinerja digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Dimensi disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS.

Sampai dengan triwulan I tahun 2024, meski jumlah pegawai dengan latar belakang pendidikan di bawah S1 relatif kecil, yaitu sejumlah 2 orang (3,44%), namun kontribusi pegawai dimaksud dibutuhkan untuk menjalankan fungsi BBRSEKP dalam hal pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. Kemudian jumlah pegawai dengan tingkat pendidikan S3 mempunyai tren yang menurun dibandingkan tahun 2021, karena adanya mutasi pegawai BBRSEKP ke Badan Riset Nasional sesuai dengan Perpres 78 Tahun 2021 maupun ke eselon I lainnya. Secara keseluruhan, jumlah pegawai BBRSEKP pada tahun 2023 berkurang sebesar 0,96% dibandingkan pada tahun 2022.

Terlepas dari kebijakan organisasi riset yang sedang dialami saat ini, BBRSEKP masih menghadapi beberapa tantangan untuk melaksanakan kegiatan organisasi kedepan, antara lain:

1. Laboratorium sosial ekonomi belum memiliki sarana dan prasarana yang sesuai dengan spesifikasi sehingga membutuhkan anggaran untuk mengembangkan laboratorium sesuai standar dalam mendukung pelaksanaan tugas organisasi.
2. Kebutuhan anggaran untuk peningkatan kapasitas SDM fungsional perencana, pranata komputer, statistisi untuk meningkatkan keahlian terkait data analisis, programmer, desain grafis, *full-stack developer*, dll;
3. Sarana dan prasarana fisik perpustakaan belum sesuai standar perpustakaan;
4. Kondisi dan ketersediaan alat pengolah data yang sudah tidak up to date dan sesuai dengan kebutuhan terkini;

5. Jumlah ruangan pertemuan yang masih terbatas, kondisi saat ini ketersediaan ruang pertemuan digunakan bersama oleh beberapa satuan kerja yang masing-masing mempunyai frekuensi pertemuan yang tinggi.

2) Permasalahan

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan berkenaan dengan kebijakan tingkat nasional menyatukan kegiatan riset yang menyebabkan perubahan mendasar pada organisasi yang melaksanakan riset. Terbitnya peraturan Presiden No 78 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional mengambil alih tugas dan fungsi riset di kementerian dan lembaga sehingga kegiatan riset menjadi tidak lagi dapat dilaksanakan sejak Triwulan 3 Tahun 2022 sampai dengan saat ini selama organisasi baru belum terbentuk. Sehingga unit kerja yang memiliki tugas riset pada tahun 2022-2023 ini hanya melaksanakan kegiatan untuk mencapai indikator kinerja dukungan manajerial.

1.6 Sistematika Laporan

Laporan Kinerja Triwulanan ini bertujuan untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan pada triwulan I tahun 2024, yaitu dengan melakukan analisis atas capaian kinerja (*performance results*) tahun 2024 terhadap rencana kinerja (*performance plans*) tahun 2024. Analisis tersebut memungkinkan teridentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) sebagai umpan balik perbaikan kinerja di tahun berikutnya. Sejalan dengan hal tersebut, sistematika penyajian laporan kinerja adalah sebagai berikut:

1. Cover Laporan

2. **Kata Pengantar**, berisi pengantar laporan dan dilengkapi dengan tanggal, bulan dan tahun serta di tanda tangani oleh Kepala BBRSEKP.

3. **Ringkasan Eksekutif**, berisi ringkasan dari laporan, meliputi: uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capaian kinerja, dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja .

4. **Bab I Pendahuluan**, berisi gambaran umum tentang organisasi, seperti tugas dan fungsi, struktur organisasi, keragaan pegawai dan organisasi serta potensi dan permasalahan.

5. **Bab II Perencanaan Kinerja**, berisi uraian singkat tentang Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun Berjalan, serta Pengukuran Kinerja.

6. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**,

A. Capaian Kinerja Organisasi

Berisi capaian kinerja dari indikator- indikator kinerja telag ditetapkan. Untuk setiap pernyataan kinerja dari sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja yang meliputi:

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun berjalan dengan tahun lalu (dua tahun terakhir);
- c. Membandingkan realisasi kinerja tahun berjalan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- d. Membandingkan realiasi kinerja tahun berjalan dengan standar nasional jika ada;
- e. Menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah di lakukan;
- f. Menganalisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan dan pencapaian target kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

7. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

8. Lampiran

- a. Perjanjian Kinerja; dan
- b. Lain – lain yang dianggap perlu

BAB 2

Perencanaan Kinerja

2.1 Rencana Strategis

2.2 Rencana Kerja Tahunan

2.3 Perjanjian Kinerja

2.4 Pengukuran Kinerja



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 merupakan acuan dan arahan bagi BBRSEKP dalam merencanakan dan melaksanakan penelitian dalam periode waktu lima tahun secara menyeluruh terintegrasi dan sinergis. Seiring berjalannya Kegiatan Renstra BBRSEKP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Rencana Strategis Badan Penyuluhan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang mengacu pada Undang-Undang Nasional, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Nasional (2020-2024), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025.

Awalnya, pada tahun 2020, Badan Penyuluhan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) telah menetapkan Rencana Strategis BPPSDMKP tahun 2020 - 2024 melalui Peraturan Kepala BRSDM Nomor 180/PER-BRSDM/2021 Tentang Rencana Strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun 2021-2024. Menindaklanjuti Renstra BRSDM tersebut, BBRSEKP telah menetapkan Rencana Strategis BBRSEKP Tahun 2020- 2024 melalui Surat Keputusan Nomor 610 /BRSDM-BBRSEKP/TU.110/IV/2021 Kemudian untukantisipasi perubahan kelembagaan Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBRSEKP) tindak lanjut implementasi amanat UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang diturunkan dengan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang BRIN, yang memuat peleburan berbagai lembaga serta tugas dan fungsi riset ke dalam BRIN sehingga diperlukan penyesuaian kebijakan.

Menindaklanjuti perkembangan perubahan arah kebijakan/program/ kegiatan yang mengakibatkan perubahan pada Sasaran/Indikator/volume target diperlukan reviu/evaluasi terhadap Sasaran/Indikator/volume target pada Renstra BBRSEKP tahun 2020 – 2024 berdasarkan analisis capaian, analisis tindak lanjut dan action plan yang akan dilakukan untuk mengoptimalkan capaian kinerja.

Pada tanggal 6 Desember 2021, melalui Nota Dinas Nomor 7142/BRSDM.1.RC.210/XII/2021, BPPSDM menyampaikan justifikasi usulan pemuktahiran Prioritas Nasional dan Major Project pada Rencana Kerja BRSDM Tahun 2021 ini kemudian

menjadi dasar tindak lanjut atas Rekomendasi Inspektorat III, Itjen KKP pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) BRSDM, bahwa BRSDM perlu melakukan revisi RENSTRA BPPSDMKP Tahun 2020-2024 untuk merubah target jangka menengah yang disesuaikan dengan standar biaya per sasaran/per IK (biaya output/outcome) dan Indikator Kinerja Terbaru.

Selanjutnya sesuai dengan arahan BPPSDMKP, maka BBRSEKP melakukan perubahan target jangka menengah yang disesuaikan dengan standar biaya per sasaran/per IK (biaya output/outcome) dan Indikator Kinerja Terbaru sesuai dengan arahan BPPSDMKP.

A. Visi

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi KKP 2020-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”. Visi KKP ini merupakan perwujudan Visi Presiden terpilih menetapkan visi 2020 – 2024 dalam sektor kelautan dan perikanan.

BPPSDMKP sebagai unit eselon 1 KKP mempunyai visi untuk mendukung visi KKP. Visi BPPSDMKP pada tahun 2020-2024 adalah mendukung visi KKP yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.

BBRSEKP yang merupakan unit di bawah BPPSDM mempunyai visi yang lebih spesifik sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh BBRSEKP. Tugas dan fungsi BBRSEKP adalah melaksanakan kegiatan riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan. Visi yang diusung oleh BBRSEKP ini tetap mendukung Visi BRSDM dan Visi KKP. Oleh karena itu visi BBRSEKP 2020 – 2024 adalah

“Menjadi Lembaga Riset Terkemuka Penghasil Rekomendasi Kebijakan dan Inovasi Rekayasa Sosial Ekonomi dalam Rangka Mendukung Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan”

Visi tersebut mengandung kata-kata kunci yang dijabarkan sebagai **Lembaga Riset Terkemuka Penghasil Rekomendasi Kebijakan** adalah Lembaga riset yang:

1. Menciptakan iklim riset yang konsisten dan melahirkan hasil-hasil berupa rekomendasi kebijakan yang berdampak pada pengingkatan mutu kebijakan di sector kelautan dan perikanan.

2. Menjadikan hasil-hasil riset sebagai dasar dalam penyelenggaraan kebijakan pembangunan di sektor KP.

Terkemuka adalah menjadi pelopor dan rujukan utama dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi kelautan dan perikanan.

Inovasi Rekayasa Sosial Ekonomi adalah menghasilkan kebaruan-kebaruan hasil riset yang dapat diimplementasikan dengan mempertahankan keberlanjutan SDKP untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat KP.

B. Misi

Misi BRSEKP mengacu pada misi BPPSDM yang menjalankan misi Presiden dan KKP dalam bidang kelautan dan perikanan yaitu:

1. **Misi ke-1** yakni Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia melalui Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan
2. **Misi ke-2** yakni Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional
3. **Misi ke-4** yakni Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
4. **Misi ke-8** yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Misi BBRSEKP merupakan upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi BBRSEKP, meliputi:

1. Menyediakan rekomendasi kebijakan untuk menciptakan struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing usaha kelautan dan perikanan melalui riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan dan inovasi rekayasa sosial;
2. Menyediakan rekomendasi kebijakan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan untuk mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan dan inovasi rekayasa sosial; dan
3. Menerapkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BBRSEKP.

C. Tujuan

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi BBRSEKP, maka tujuan yang ingin dicapai selama tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan rumusan kebijakan sosial ekonomi kelautan dan perikanan sebagai landasan kebijakan kelautan dan perikanan (*science based policy*);
2. Menghasilkan model sosial ekonomi kelautan dan perikanan yang mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan;
3. Menghasilkan penerapan model integrasi sosial ekonomi kelautan dan perikanan yang mendukung peningkatan peran adopsi teknologi terhadap pembangunan sektor kelautan dan perikanan;
4. Menghasilkan *big data* sosial ekonomi kelautan dan perikanan; dan
5. Menyelenggarakan fungsi kelembagaan dan manajerial riset dan SDM secara efektif dan efisien.

D. Sasaran Startegis BBRSEKP 2020-2024

Sasaran startegis merupakan kondisi yang akan dicapai dan mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program. Hasil Reviu BPPSDMKP tahun 2021 – 2024 menetapkan lima sasaran program yang mengacu pada sasaran strategis KKP, yaitu:

SP-3 Kelompok Kelautan dan Perikanan yang ditumbuh kembangkan;

SP-4 Iptek Hasil Kegiatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan KP yang Dimanfaatkan oleh Masyarakat;

SP-8 Hasil riset KP yang digunakan dalam penyusunan kebijakan;

SP-9 Tatakelola pemerintahan yang baik Lingkup BPPSDM.

Sebagai unit kerja Eselon II, BBRSEKP melaksanakan kegiatan yang di *cascading* dari sasaran strategis (SP) BPPSDMKP menjadi sasaran kegiatan (SK) BBRSEKP yaitu **SP-8** dan **SP-9** diturunkan menjadi SK-1 dan SK -2 sebagai sasaran kegiatan yang harus dicapai yaitu:

SK-1 Tersedianya Perumusan Kebijakan KP yang digunakan untuk Penyusunan Kegiatan

SK-2 Tatakelola pemerintahan yang baik di BBRSEKP

Tabel 2. Keterkaitan Visi, Misi dan Tujuan dalam Renstra BBRSEKP 2020-2024

Visi	Misi	Tujuan
Menjadi Lembaga riset terkemuka penghasil rekomendasi kebijakan dan inovasi rekayasa sosial ekonomi dalam rangka mendukung terwujudnya “Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan”	Menyediakan rekomendasi kebijakan untuk menciptakan Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing pada usaha melalui riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan dan inovasi rekayasa sosial ekonomi.	Menghasilkan rumusan kebijakan sosial ekonomi kelautan dan perikanan sebagai landasan kebijakan kelautan dan perikanan (<i>science based policy</i>)
	Menyediakan rekomendasi kebijakan pengelolaan SDKP untuk mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui riset	Menghasilkan model sosial ekonomi kelautan dan perikanan yang mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan

	sosial ekonomi kelautan dan perikanan dan inovasi rekayasa sosial ekonomi.	Menghasilkan penerapan model integrasi sosial ekonomi kelautan dan perikanan mendukung peningkatan peran adopsi teknologi terhadap pembangunan sektor KP
		Menghasilkan <i>big data</i> sosial ekonomi kelautan dan perikanan
	Menerapkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya dalam pelaksanaan tugas BBRSEKP	Menyelenggarakan fungsi kelembagaan dan manajerial riset dan SDM secara efektif dan efisien

Sasaran Kegiatan BBRSEKP 2024

Berdasarkan uraian sebelumnya peta strategis kegiatan riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan yang dilaksanakan oleh BBRSEKP pada Tahun 2024 seperti pada Gambar dibawah ini :



Gambar 5. Peta Strategis Kegiatan BBRSEKP 2024

Metode pengukuran capaian sasaran kegiatan tersebut dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja (IK) atau *Key Performance Indicator*, disingkat KPI pada masing - masing sasaran. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *balance scorecard* dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitupada <http://Kinerjaku.kkp.go.id> dengan pengukuran 2 strategis kegiatan sebagai berikut :

a) Sasaran Kegiatan 1

Sasaran Kegiatan ke satu (SK- 1) yang akan dicapai adalah " Tersedianya Perumusan Kebijakan KP yang digunakan untuk Penyusunan Kegiatan" dengan Indikator Kinerja :

1. Hasil Perumusan Kebijakan Responsif KP yang digunakan untuk Penyusunan Kebijakan (Rekomenjak), pada tahun 2024 sebanyak 8 Rekomendasi

b) Sasaran Kegiatan 2

Sasaran Kegiatan ke dua (SK-2) yang akan dicapai adalah “Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker” dengan Indikator Kinerja:

1. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BBRSEKP (Indeks), pada tahun 2024 senilai 80 indeks;
2. Persentase Peningkatan Kapasitas SDM BBRSEKP (%) pada tahun 2024 sebesar 85%;
3. Persentase Dokumen Bahan Pimpinan yang Dimanfaatkan (%), pada tahun 2024 sebesar 100%;
4. Persentase Efektifitas penyebarluasan informasi kegiatan Sosial Ekonomi KP (%), pada tahun 2024 sebesar 90,5%;
5. Kerjasama Eselon I yang ditindaklanjuti oleh BBRSEKP (Paket), pada tahun 2024 sebanyak 3 paket;
6. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar BBRSEKP (%), pada tahun 2024 sebesar 94%;
7. Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja BBRSEKP (Proposal), pada tahun 2024 sebanyak 1 proposal;
8. Persepsi Kepuasan Layanan Publik Sosial Ekonomi KP (Nilai), pada tahun 2024 senilai 88;
9. Nilai IKPA BBRSEKP (Nilai), pada tahun 2024 senilai 93,76;
10. Nilai Kinerja Anggaran BBRSEKP (Nilai), pada tahun 2024 senilai 82;
11. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Balai Besar Riset Sosial Ekonomi KP (Nilai), pada tahun 2024 senilai 94;
12. Nilai PM SAKIP BBRSEKP (Nilai), pada tahun 2024 senilai 81.
13. Persentase Realisasi Anggaran BBRSEKP (%), pada tahun 2024 sebesar 98,00%
14. Batas Tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BBRSEKP(%) pada tahun 2024 sebesar $\leq 0,50\%$
15. Jurnal Sosial Ekonomi yang Ter-reakreditasi (Indeks Jurnal), pada tahun 2024 sebanyak 1

16. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRSEKP (%), pada tahun 2024 sebesar 82%
17. Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Mempertahankan Predikat WBK/WBBM yang lolos Penilaian Menuju Wilayah Bebas Korupsi (Nilai), pada tahun 2024 senilai 85,00
18. Persentase Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BBRSEKP (%), pada tahun 2024 sebesar 77,80%
19. Layanan Perkantoran BBRSEKP (%), pada tahun 2024 sebesar 100%

2.2 Rencana Kerja Tahunan

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan sasaran strategis, maka Rencana Kerja BBRSEKP Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3. Rencana Kerja BBRSEKP Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Anggaran (Rp.000)	Anggaran Revisi I (Rp.000)	Anggaran Revisi II (Rp.000)	Anggaran Revisi III (Rp.000)
1	Tersedianya Perumusan Kebijakan KP yang digunakan untuk Penyusunan Kegiatan	1.000.000.000 Blokir AA	1.000.000.000 Blokir AA	1.000.000.000 Blokir AA	1.000.000.000 Blokir AA
2	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	11.300.000	11.300.000	11.300.000	11.300.000
Total Anggaran Tahun 2024		12.300.000	12.300.000	12.300.000	12.300.000

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja BBRSEKP level 2 dibuat sebagai pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi yang diturunkan dari rencana kerja tahun 2024 kementerian dan program BPPSDMKP. Dokumen perjanjian kinerja memuat informasi tentang program, sasaran kegiatan, indikator kinerja dan target yang akan dicapai serta alokasi anggaran per tahun. Tahun 2024 BBRSEKP telah menetapkan rencana untuk merealisasikan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja sebagai penjabaran atas sasaran program Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan dan ditandatangani oleh Kepala BSDMKP Bersama dengan Kepala BBRSEKP pada tanggal 27 Desember 2023.

Adapun Indikator Kinerja dengan rincian dan target pada tahun 2024 sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 4. Perjanjian Kerja BBRSEKP Tahun 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET PK
1	Tersedianya Perumusan Kebijakan KP yang digunakan untuk Penyusunan Kegiatan	1	Hasil Perumusan Kebijakan Responsif KP yang digunakan untuk Penyusunan Kebijakan (Rekomenjak)	8
2	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	2	Indeks Profesional ASN Lingkup BBRSEKP (Indeks)	80
		3	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM BBRSEKP (%)	85
		4	Persentase Dokumen Bahan Pimpinan yang Dimanfaatkan (%)	100
		5	Persentase Efektifitas penyebarluasan informasi kegiatan Sosial Ekonomi KP (%)	90,5
		6	Kerjasama Eselon I yang ditindaklanjuti oleh BBRSEKP (Paket)	3
		7	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar BBRSEKP (%)	94
		8	Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja BBRSEKP	1
		9	Persepsi Kepuasan Layanan Publik Sosial Ekonomi KP	88
		10	Nilai IKPA BBRSEKP (Nilai)	93,76
		11	Nilai Kinerja Anggaran BBRSEKP (Nilai)	82
		12	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Balai Besar Riset Sosial Ekonomi KP (Nilai)	94
		13	Nilai PM SAKIP BBRSEKP (Nilai)	81
		14	Persentase Realisasi Anggaran BBRSEKP (%)	98
		15	Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK atas LK BBRSEKP Dibandingkan Realisasi Anggaran BBRSEKP (%)	≤ 0,5
		16	Jurnal Sosial Ekonomi yang Ter-reakreditasi (Indeks Jurnal)	1
		17	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan BBRSEKP yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	82
		18	Nilai Minimal yang Diperyaratkan untuk Mempertahankan Predikat WBK/WBBM yang lolos Penilaian Menuju Wilayah Bebas Korupsi (Nilai)	85

		19	Persentase Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BBRSEKP (%)	77,80
		20	Layanan Perkantoran BBRSEKP (%)	100

2.4 Pengukuran Kinerja

Pengukuran capaian kinerja BBRSEKP Tahun 2024, dilakukan dengan membandingkan antara data target dan realisasi IK, akan diperoleh indeks capaian IK. Penghitungan indeks capaian IK perlu memperhitungkan jenis polarisasi IK yang berlaku yaitu maximize, minimize, dan stabilize. Ketentuan penetapan indeks capaian IK adalah:

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Formula penghitungan indeks capaian IK untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda;
4. Adapun status Indeks capaian IK adalah sebagai berikut:

Warna	Keterangan
Istimewa	nilai 110 - 120
Baik	nilai 90 - <110
Cukup	nilai 70 - <90
Kurang	nilai 50 - <70
Sangat Kurang	untuk nilai <50
Belum ada penilaian	

Metode pengukuran kinerja pada BBRSEKP dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulanan), yaitu pada bulan Maret (B03), Juni (B06), September (B09) dan Desember (B12). Pengukuran dilakukan oleh Tim SAKIP dan Laporan Kinerja BBRSEKP berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi KP Nomor: 65/KEP-BPPSDMKP-BBRSEKP/2022 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kinerja Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP). Keanggotaan Tim Pengelola Kinerja terdiri dari seluruh Koordinator yang bertanggung jawab terhadap pencapaian indikator kinerja dan staf dan tim sekretariat. Dalam pelaksanaannya, capaian kinerja triwulanan dipantau melalui kegiatan monitoring dan evaluasi per triwulan yang dihadiri penanggung jawab dan Tim Pengelola Kinerja. Hasil pemantauan dan pengukuran diinput kedalam aplikasi Kinerjaku untuk selanjutnya dilakukan validasi oleh sekretariat BPPSDMKP.

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

- 3.1 Capaian Kinerja BBRSEKP TW I Tahun 2024**
- 3.2. Evaluasi Dan Analisis Kinerja**
- 3.3 Realisasi Keuangan**
- 3.4 Analisis Efisiensi Anggaran**

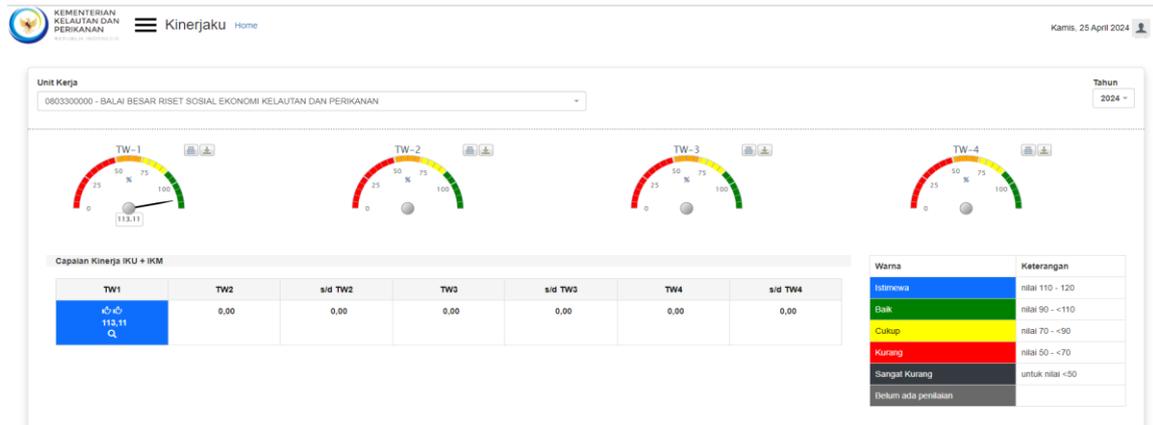


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja BBRSEKP Triwulan I Tahun 2024

Pada tahun 2024, BBRSEKP telah menetapkan 20 (Dua Puluh) IK, dimana realisasi sampai dengan tahun 2024 menunjukkan bahwa sasaran kegiatan telah dapat dicapai dengan rata-rata capaian sebesar **113,11% (Istimewa)** (Gambar 2). Uraian rincian dari hasil pengukuran capaian kinerja dilaporkan pada bagian selanjutnya bab III.



Gambar 6. Dashboard Kinerja BBRSEKP Tahun 2024 sebagaimana pada aplikasi <http://Kinerjaku.kkp.go.id>

Keberhasilan pencapaian sasaran diantaranya karena faktor pengawalan monitoring dan evaluasi kegiatan pada BBRSEKP yang cukup ketat, mulai dari tahap awal hingga tahap akhir kegiatan. Terutama ketika mengalami perlambatan karena adanya perubahan transformasi struktur organisasi menjadi fungsional dan menunggu terbitnya SOTK organisasi baru belum sepenuhnya yang mana monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan sangat efektif mengawal agar kegiatan dapat tetap dilaksanakan. Upaya pemantauan menghasilkan beberapa upaya dan langkah antisipatif agar kegiatan tetap berjalan sesuai rencana dengan melakukan beberapa perubahan dan metode dalam pelaksanaan kegiatan pada BBRSEKP. Kegiatan pengelolaan kinerja dituangkan dalam Surat Tugas Kepala BBRSEKP Nomor: 39/KEP-BPPSDMKP-BBRSEKP/2024 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kinerja Tahun 2024

Monitoring dan evaluasi realisasi capaian PK online juga dilakukan melalui aplikasi yang difasilitasi oleh kementerian Kelautan dan Perikanan melalui website <http://Kinerjaku.kkp.go.id>. Pengisian aplikasi kinerjaku oleh BBRSEKP setelah pelaksanaan pemantauan rutin terhadap perkembangan capaian melalui kegiatan monev rencana aksi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan monev dilakukan untuk memastikan tercapainya target IK yang tercantum di dalam PK dan target kegiatan per komponen. Metode yang dilakukan adalah dengan memantau capaian kinerja setiap bulan ataupun triwulan beserta kendala yang dihadapi Pemantauan secara periodik dilakukan sebagai Langkah antisipatif dan

preventif terhadap indikator yang memiliki risiko tinggi untuk dicapai atau mungkin tidak dapat mencapai target.

3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan dengan membandingkan antara target dengan capaiannya. Evaluasi dan analisis kinerja juga dilakukan untuk melihat sejauh mana target kinerja tahun berjalan dapat direalisasikan melalui pengukuran kinerja dengan membandingkan realisasi terhadap target kinerja. Analisis capaian kinerja diukur untuk setiap indikator kinerja sasaran kegiatan, membandingkan kinerja triwulan I tahun 2024 dengan kinerja triwulan I tahun 2023. Analisis dan evaluasi capaian kinerja BBRSEKP tahun 2024 menurut penetapan dua sasaran kegiatan. Berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan BBRSEKP yang disusun pada bulan Desember 2023 saat ini memiliki 2 (dua) sasaran kegiatan yaitu SK-1. Tersedianya Perumusan Kebijakan KP yang digunakan untuk Penyusunan Kegiatan, serta SK-2 Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker memiliki 20 (dua puluh) Indikator Kinerja.

Selain itu, analisis capaian kinerja juga menganalisis akar permasalahan yang menyebabkan kinerja menurun, efisiensi penggunaan sumber daya serta analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau berkontribusi terhadap penurunan kinerja BBRSEKP pada triwulan I tahun 2024. Hasil analisis capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran kegiatan sebagaimana pada tabel 4 berikut ini.

Tabel 5. Capaian Kerja BBRSEKP Triwulan I Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target TW I 2024	Capaian TW I 2024	% Capaian
1	Tersedianya Perumusan Kebijakan KP yang digunakan untuk Penyusunan Kegiatan	1 Hasil Perumusan Kebijakan Responsif KP yang digunakan untuk Penyusunan Kebijakan (Rekomenjak)	-	-	-
2	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	2 Indeks Profesional ASN Lingkup BBRSEKP (Indeks)	-	-	-
		3 Persentase Peningkatan Kapasitas SDM BBRSEKP (%)	15	16,67	111,13
		4 Persentase Dokumen Bahan Pimpinan yang Dimanfaatkan (%)	65	100	120
		5 Persentase Efektifitas penyebaran informasi kegiatan Sosial Ekonomi KP (%)	60	152	120
		6 Kerjasama Eselon I yang ditindaklanjuti oleh BBRSEKP (Paket)	2	3	120
		7 Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar BBRSEKP (%)	94	133,33	120

		8	Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja BBRSEKP	-	-	-
		9	Persepsi Kepuasan Layanan Publik Sosial Ekonomi KP	75	89,58	119,44
		10	Nilai IKPA BBRSEKP (Nilai)	-	-	-
		11	Nilai Kinerja Anggaran BBRSEKP (Nilai)	-	-	-
		12	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Balai Besar Riset Sosial Ekonomi KP (Nilai)	-	-	-
		13	Nilai PM SAKIP BBRSEKP (Nilai)	-	-	-
		14	Persentase Realisasi Anggaran BBRSEKP (%)	15	21,29	120
		15	Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK atas LK BBRSEKP Dibandingkan Realisasi Anggaran BBRSEKP (%)	-	-	-
		16	Jurnal Sosial Ekonomi yang Ter-reakreditasi (Indeks Jurnal)	-	-	-
		17	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan BBRSEKP yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	82	71,43	87,11
		18	Nilai Minimal yang Diperyaratkan untuk Mempertahankan Predikat WBK/WBBM yang Lolos Penilaian Menuju Wilayah Bebas Korupsi (Nilai)	-	-	-
		19	Persentase Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BBRSEKP (%)	-	-	-
		20	Layanan Perkantoran BBRSEKP (%)	100	100	100

Capaian Kinerja Pada Sasaran Kegiatan 1

Tersedianya Perumusan Kebijakan KP yang digunakan untuk Penyusunan Kegiatan

Indikator Kinerja 1.

Hasil Perumusan Kebijakan Responsif KP yang digunakan untuk Penyusunan Kebijakan (Rekomenjak)

IK Hasil Perumusan Kebijakan Responsif KP yang digunakan untuk Penyusunan Kebijakan (Rekomenjak) merupakan salah satu dokumen penyampaian hasil riset rekomendasi kebijakan berupa analisis/kajian berdasarkan data – data ilmiah yang tersedia untuk menghasilkan rekomendasi terhadap isu strategis/kebijakan yang disajikan secara singkat (3-4 halaman) menampilkan alternatif: opsi kebijakan, implikasi dan rekomendasi untuk stakeholder dalam pengambilan Keputusan/Kebijakan.

Adapun progress kegiatan sampai dengan triwulan I untuk IK ini belum dapat dilaksanakan karena kegiatan dalam Blokir *Automatic Adjustment* (AA) pada kegiatan, dalam rangka

menindaklanjuti surat Kepala BPPSDMKP No.B.373/BPPSDM.1/RC.420/I/2024 perihal penyampaian Blokir Anggaran AA BPPSDMKP TA 2024

Kegiatan IK ini di dukung oleh anggaran BBRSEKP melalui kegiatan “Analisis Kebijakan Sosial Ekonomi” dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,-. Dan realisasi anggaran sebesar Rp. - jika dibandingkan dengan persentase capaian sesuai kinerja IK untuk kegiatan ini belum terdapat nilai efisiensi karena kegiatan masih dalam blokir DJA.

Capaian Kinerja Pada Sasaran Kegiatan 2

Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker

Indikator Kinerja 1.

Indeks Profesional ASN Lingkup BBRSEKP (Indeks)

IK Indeks profesionalitas ASN Lingkup BBRSEKP merupakan indikator yang dibentuk seiring dengan terbitnya Peranturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. IK ini diukur secara Semesteran. Berdasarkan Surat dari Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara No. 006//B-BM.02.01/SD/C/2024 Tanggal 22 Mei 2024, perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2022 dan Nota Dinas Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi terjadi perubahan pengukuran indeks IP ASN sebagai berikut:

1. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2024 dilakukan dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi ASN (SIASN) pada Layanan indeks Profesionalitas ASN.
2. Penyesuaian instrumen pada dimensi Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 6. Penyesuaian Bobot Kualifikasi IP ASN

NO	DIMENSI	JENJANG JABATAN	PERSYARATAN PENDIDIKAN MINIMAL DIANGKAT KEDALAM JABATAN	PENDIDIKAN YANG DIPEROLEH PNS (BOBOT)					
				S3	S2	S1/DIV	DIII	DII/DI/SMA/ SEDERAJAT	DIBAWAH SLTA
1	Kualifikasi	JPT	S1/DIV	25	23	20	15	10	5
		Jabatan Administrator	S1/DIV	25	23	20	15	10	5
		Jabatan Pengawas	DIII	25	23	21	20	15	10
		Jabatan Fungsional (Keterampilan)	SLTA	25	23	22	21	20	10
			DIII	25	23	21	20	10	5
		Jabatan Fungsional (Keahlian)	S1/DIV	25	23	20	15	10	5
			S2	25	20	15	10	5	1
Jabatan Pelaksana	SLTA	25	23	22	21	20	10		

Tabel 7. Penyesuaian Bobot Kompetensi IP ASN

DIMENSI	JENJANG JABATAN	PENGEMBANGAN KOMPETENSI YANG DI IKUTI (BOBOT)							
		PELATIHAN STRUKTURAL KEPEMIMPINAN		PELATIHAN FUNGSIONAL		PELATIHAN TEKNIS		SEMINAR/KONFRENSI/SARASEHAN/WORKSHOP/LOKAKARYA/SEJENISNYA	
		SUDAH	BELUM	SUDAH	BELUM	>= 20 JP	< 20 JP	SUDAH	BELUM
Kompetensi	JPT	15	-	-	-	15	Proposional	10	-
	Jabatan Administrator	15	-	-	-	15	Proposional	10	-
	Jabatan Pengawas	15	-	-	-	15	Proposional	10	-
	Jabatan Fungsional	-	-	15	-	15	Proposional	10	-
	Jabatan Pelaksana	-	-	-	-	15	Proposional	17,5	-

Tabel 8. Penyesuaian Bobot Kinerja IP ASN

DIMENSI	PREDIKAT KINERJA	BOBOT	
		MAKSIMAL	PEROLEHAN
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/Misconduct		15
	Sangat Kurang		10

Tabel 9. Penyesuaian Bobot Disiplin IP ASN

DIMENSI	INDIKATOR	BOBOT DIMENSI MAKSIMAL	BOBOT SUB
Disiplin	Data/Informasi Riwayat Hukuman Disiplin	5	
	1 Tidak Pernah Dikenai Hukuman Disiplin		5
	2 Pernah Dikenai Hukuman Disiplin		
	a. Ringan		3
	b. Sedang		2
	c. Berat		1

Pada TW I Tahun 2024 IKM Indeks Profesional ASN Lingkup BBRSEKP (Indeks) belum terdapat capaian, karena capaian baru dapat diukur di semester I atau triwulan II.

Jika dibandingkan dengan capaian triwulan I tahun 2023, untuk IK ini sama dengan atau tidak terdapat kenaikan maupun penurunan capaian karena capaian baru dapat diukur di triwulan berikutnya atau semester I dan akhir tahun.

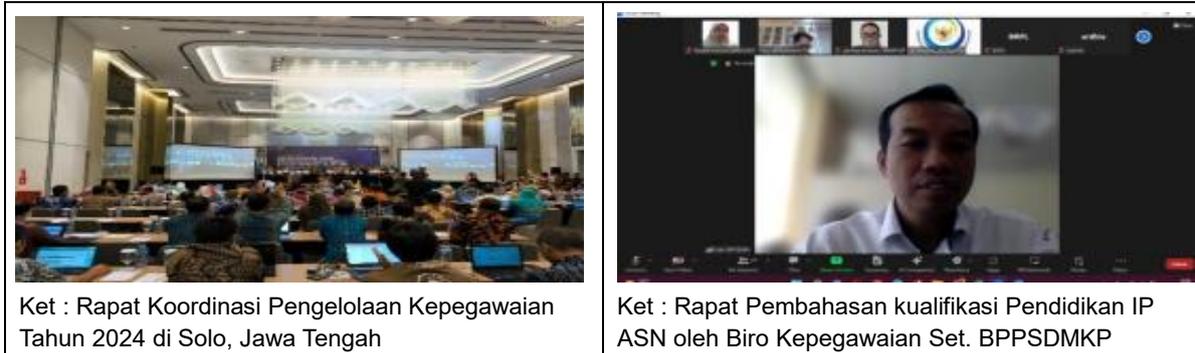
Jika dibandingkan dengan Satker di BPPSDMKP untuk IK ini tidak dapat dibandingkan karena capaian baru dapat diukur triwulan berikutnya atau semester I dan diakhir tahun.

Progress Kegiatan pendukung IK sampai dengan triwulan I antara lain:

1. Rapat internal pembahasan penyusunan kerangka acuan pelaksanaan kegiatan dan rencana kerja kegiatan;
2. Melakukan pengawalan serta koordinasi progres petugas belajar di BBRSEKP;
3. Mengikuti kegiatan sosialisasi terkait Pengenalan Platform Knowledge Management System Lingkup BBRSEKP yang di ikuti pegawai BBRSEKP.

Kegiatan IK ini di dukung oleh anggaran BBRSEKP melalui kegiatan Manajerial “Layanan Perencanaan SDM Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan” dengan pagu anggaran sebesar Rp. 42.000.000

Gambar 7. Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 2



Indikator Kinerja 3.

Persentase Peningkatan Kapasitas SDM BBRSEKP (%)

IK Persentase Peningkatan Kapasitas SDM BBRSEKP (%) merupakan kegiatan dalam rangka penguatan dan peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan jenjang individu atau kelompok baik dalam bentuk pelatihan/training maupun diklat.

Peningkatan kapasitas SDM ini merupakan dimensi kompetensi yang digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kapasitas kompetensi yang pernah dilKti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan dan tusi organisasi. Indikator yang digunakan yaitu kelKsertaan atau riwayat pengembangan kapasitas kompetensi yang terdiri atas:

- a. Diklat Fungsional
- b. Diklat 20 JP
- c. Diklat Teknis
- d. Diklat lainnya.

Tabel 10. Capaian IK Persentase Peningkatan Kapasitas SDM BBRSEKP (%)

IKU-3. Persentase Peningkatan Kapasitas SDM BBRSEKP(%)											
Realisasi TW I				2024					Renstra BBRSEKP 2020 – 2024 (180/2020)		
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan TW I 2022-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024	
-	-	-	-	85	15	16.67	111.13	-	82	20.33	

Capain IK 3 Pada Triwulan I Tahun 2024 capaian telah melebihi dari target yang telah di tetapkan yaitu dengan target 15% dan capaian 16.67% atau sama dengan 111,13%, capaian sesuai dengan surat Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Nomor B. 643/BBRSEKP/TU.210/IV/2023 tanggal 3 April 2024 tentang Capaian IKU Persentase Peningkatan Kapasitas SDM BBRSEKP (%) TW I Tahun 2024.

Indikator ini, tidak dapat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, karena adanya penyesuaian perubahan metode pengukuran terhadap IK sesuai dengan masukan dari Bappenas, serta IK ini tidak dapat dibandingkan dengan kinerja 5 tahunan, namun jika dibandingkan dengan target jangka menengah, untuk IK ini kurang dari target tahunan sebesar 20.33%.

Keberhasilan pencapaian Persentase Peningkatan Kapasitas SDM BBRSEKP disebabkan antara lain adanya koordinasi atau konsultasi terkait prosedur dan jadwal pengajuan pelatihan khusus jabatan fungsional analis kebijakan, faktor lainnya adalah kegiatan pelatihan yang di ikuti pegawai BBRSEKP berupa Diklat/Bimtek baik secara mandiri disamping itu, keaktifan pegawai pada kegiatan-kegiatan workshop atau webinar yang diselenggarakan oleh instansi lain sebagai faktor pemicu keberhasilan pencapaian IK ini.

Kegiatan pendukung keberhasilan IK ini antara lain faktor perencanaan dan pengembangan kompetensi yang telah di susun secara berkala dan penyampaian informasi pelatihan kompetensi melalui whatsapp group di BBRSEKP maupun melalui apel pagi, pemantauan secara berkala yang dilakukan oleh pengelola kepegawaian BBRSEKP terhadap pegawai baik PNS, PPPK maupun PPNPN, serta melakukan koordinasi pelaksanaan penilaian kompetensi oleh BKN.

Kegiatan IK ini di dukung oleh anggaran BBRSEKP melalui kegiatan Manajerial “Layanan Pengembangan SDM Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan” dengan pagu anggaran sebesar Rp. 88.000.000,-.

Gambar 8. Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 3



Indikator Kinerja 4.

Persentase Dokumen Bahan Pimpinan yang Dimanfaatkan (%)

IK Persentase Dokumen Bahan Pimpinan yang Dimanfaatkan (%) merupakan kegiatan dalam rangka penyusunan maupun penyiapan dokumen berupa *briefing note*, lembar sebar, bahan presentasi, *policy brief*, *policy paper*, *policy note* dan bahan hasil kegiatan pada BBRSEKP yang dibuat dan dimanfaatkan oleh pimpinan atau pembuat kebijakan. *Briefing note*/bahan presentasi/lembar sebar/ *policy brief*/*policy note*/ *policy paper* (dokumen Output) adalah hasil dari tindaklanjut disposisi dari lainnya atau stakeholder yang ditindaklanjuti oleh BBRSEKP.

Tabel 11. Capaian IK Persentase Dokumen Bahan Pimpinan yang Dimanfaatkan

IKU-4. Persentase Dokumen Bahan Pimpinan yang Dimanfaatkan (%)										
Realisasi TW I				2024					Renstra BBRSEKP 2020 – 2024 (180/2020)	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan TW I 2022- 2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
-	-	120	100	100	65	100	120.00	-	100	100.00

Capaian IK 4 pada Triwulan I Tahun 2024 ditargetkan pada angka 65 capaian IK adalah 1100% atau sebesar 120%, capaian sesuai dengan surat Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Nomor B. 655/BBRSEKP/TU.210/IV/2024 tanggal 4 April 2024 tentang Capaian IKU Persentase Dokumen Bahan Pimpinan yang Dimanfaatkan (%), jika dibandingkan dengan capaian Triwulan I tahun 2023, tidak terjadi peningkatan ataupun penurunan capaian atau sama dengan 100%.

Jika dibandingkan dengan kinerja 5 tahunan, untuk IK ini tidak dapat dibandingkan , karena IK baru di bentuk di tahun 2022, sedangkan perbandingan capaian kinerja terhadap target Renstra 2024 sebesar 100%.

Keberhasilan pencapaian IK Persentase Dokumen Bahan Pimpinan yang Dimanfaatkan (%) disebabkan antara lain adanya koordinasi atau konsultasi serta terjalinnya komunikasi yang baik antara BBRSEKP dengan Eselon I lainnya terkait prosedur penyusunan bahan pimpinan, faktor lainnya adalah adanya permintaan materi baik *briefing note*, bahan *presentase* maupun lembar sebar dari Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP maupun Menteri Kelautan dan Perikanan.

Kegiatan pendukung keberhasilan IK ini antara lain faktor penugasan atas permintaan penyelesaian dan tindak lanjut penugasan dari pimpinan secara aktif dan responsif sehingga permintaan maupun penugasan atas penyelesaian dan tindak lanjut dapat disusun dan disampaikan tepat waktu serta pengawalan tim money terkait permintaan hasil kegiatan melalui monitoring dan evaluasi.

Kegiatan IK ini di dukung oleh anggaran BBRSEKP melalui kegiatan Manajerial “Pelayanan Kehumasan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan” dengan pagu anggaran sebesar Rp. 44.450.000,-. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.996,800,-. (11,24%).

Gambar 9. Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 4



Indikator Kinerja 5.

Persentase Efektifitas penyebarluasan informasi kegiatan Sosial Ekonomi KP (%)

IK Persentase Efektifitas penyebarluasan informasi kegiatan Sosial Ekonomi KP (%) merupakan tindakan komunikasi menyebarkan informasi secara luas baik dalam kegiatan/acara membagikan pengetahuan atau wawasan yang menghadirkan pembicara ahli dengan peserta yang membahas topik tertentu (seminar/webinar/FGD) ataupun sosialisasi kegiatan melalui sarana media sosial seperti instagram, facebook, tiktok.

Nilai efektivitas menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian dari penyebarluasan informasi sosial ekonomi KP yang diukur dengan kualitas, kuantitas dan waktu. Engagement rate adalah metrik standar yang dimanfaatkan dalam digital marketing untuk mengukur hasil dari suatu konten. Cara ini banyak digunakan pagi digital marketer yang memanfaatkan Instagram sebagai media pemasaran.

Tabel 12. Capaian IK Persentase Efektifitas penyebarluasan informasi kegiatan Sosial Ekonomi KP (%)

IKU-5. Persentase Efektifitas penyebarluasan informasi kegiatan Sosial Ekonomi KP(%)										
Realisasi TW I				2024					Renstra BBRSEKP 2020 – 2024 (180/2020)	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan TW I 2022-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
-	-	-	89.60	100	60	152	120.00	69.64	100	120

Capaian IK 5 Pada Triwulan I Tahun 2024 capaian telah melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu dengan target 60 dan capaian 152 atau sama dengan 120%. Capaian sesuai dengan surat Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Nomor B.657/BRSDM-BBRSEKP/TU.210/IV/2024 tanggal 4 April 2024 tentang Capaian IK Persentase Efektifitas penyebarluasan informasi kegiatan Sosial Ekonomi KP (%) (IKU) Triwulan I.

Jika dibandingkan dengan capaian Triwulan I tahun 2023, untuk IK ini terjadi peningkatan capaian sebesar 69.64%, Jika dibandingkan dengan kinerja 5 tahunan, untuk IK ini tidak dapat dibandingkan, karena IK baru dibentuk di tahun 2023, sedangkan perbandingan capaian kinerja terhadap target Renstra 2024 sebesar 120%.

Keberhasilan pencapaian Persentase Efektifitas Penyebarluasan Informasi Kegiatan Sosial Ekonomi disebabkan antara lain penyebarluasan informasi kegiatan sosial ekonomi melalui media sosial Instagram, Twitter, Tiktok dan Youtube, disamping itu operator yang handal dalam membuat konten di media sosial sehingga dapat menarik pengunjung untuk melihat informasi kegiatan di BBRSEKP.

Kegiatan pendukung keberhasilan IK ini antara lain faktor keaktifan operator dalam mengupload konten ke dalam media sosial BBRSEKP, membuat konten di media sosial, adanya pemantauan dan evaluasi kegiatan media sosial BBRSEKP serta Rapat internal terkait kegiatan pelayanan informasi publik dengan BRSDMKP.

Kegiatan IK ini didukung oleh anggaran BBRSEKP melalui kegiatan Manajerial "Pengelolaan Konten Publikasi Media Sosial" dengan pagu anggaran sebesar Rp. 12.500.000,-.

Gambar 10. Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 5



Indikator Kinerja 6.

Kerjasama Eselon I yang ditindaklanjuti oleh BBRSEKP (Paket)

IK Kerjasama Eselon I yang ditindaklanjuti oleh BBRSEKP (Paket) merupakan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan satu atau lebih lembaga/badan/organisasi, untuk mendukung kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Jumlah jejaring, kemitraan dan/atau kerja sama kajian, analisis dan perhitungan di bidang kelautan dan perikanan. Jejaring adalah jalinan asosiasi/forum/ organisasi lainnya yang memiliki kesamaan profesi/kepakaran yang di ikuti oleh Satker/ UPT lingkup BRSDM.

Tabel 13. Capaian IK Kerjasama Eselon I yang ditindaklanjuti oleh BBRSEKP (Paket)

IKU-6. Kerjasama Eselon I yang ditindaklanjuti oleh BBRSEKP (Paket)										
Realisasi TW I				2024					Renstra BBRSEKP 2020 – 2024 (180/2020)	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan TW I 2022-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
-	-	-	-	3	2	3	120.00	-	3	100

Capain IK 6 Pada Tahun 2024 capaian telah mecapai target yang telah di tetapkan yaitu dengan target 2 dan capaian 3 atau sama dengan 120%, capaian sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 14. Kerjasama Eselon I yang ditindaklanjuti oleh BBRSEKP

No	Mitra Kerjasama	Bentuk Kerjasama	Nomor Perjanjian	Judul Kegiatan	Masa Berlaku
1	Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Brawijaya	Perjanjian Kerjasama (PKS)	30/BRSDM/KKP/PK S/VIII/2019	Pengembangan Riset Sosial Ekonomi Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Agustus 2024

2	<i>Sustainable Fisheries Partnership Foundation</i>	Kerangka Acuan Kerja (KAK)	-	Indikator Sosial Ekonomi Dalam Pengelolaan Perikanan Rajungan Yang Berkelanjutan	2024
3	<i>Food and Agriculture Organization of the United Nations</i>	<i>Letter Of Agreement (LOA)</i>	TF.FAINS.T5G11001 7193	<i>Impact Assessment of Livelihood, Gender, and Socio-Ecological Five Districts to Monitor the Inland Aquatic Ecosystem in Indonesia</i>	2025

jika dibandingkan dengan capaian Triwulan I tahun 2023, untuk IK tidak dapat dibandingkan karena adanya perubahan metode pengukuran di tahun 2024 dimana semula tahunan menjadi triwulanan, jika dibandingkan dengan kinerja 5 tahunan, karena IK baru di bentuk di tahun 2022, sedangkan perbandingan capaian kinerja terhadap target Renstra 2024 sebesar 100%.

Jika dibandingkan dengan satker sejenis di Lingkungan BPPSDMKP, antara BBRSEKP dengan Puslatluh, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 15. Perbandingan Capaian IK 6 dengan satker sejenis

No	Satuan Kerja	Target 2024	Capaian 2024	Persentase
1	BBRSEKP – BPPSDMKP	2	3	120
2	PUSLATLUH – BPPSDMKP	2	4	120

Capaian IK Kerjasama Eselon I yang ditindaklanjuti oleh BBRSEKP (Paket) lebih rendah jika dilihat dari sisi capaian, namun jika berdasarkan pada persentase maka capaian pada BBRSEKP sama dengan 120%.

Penyebab keberhasilan IK ini dikarenakan:

1. Adanya regulasi dan pedoman yang jelas tentang tata cara kerjasama antar BBRSEKP dengan Stakeholder;
2. Adanya kesamaan tusi antar BBRSEKP dengan stakeholder atau pemangku kepentingan serta;
3. Adanya kesamaan pelaksanaan kegiatan antar BBRSEKP dengan stakeholder atau pemangku kepentingan serta.

Adapun kegiatan yang dilakukan dalam mendukung keberhasilan IK adalah sebagai berikut:

1. Intervensi kegiatan dalam rangka percepatan kegiatan Kapasitas Sumber Daya, Publikasi dan Diseminasi Hasil Kegiatan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan;
2. Kegiatan yang terjadwal dan efektif kepada Stakeholder;
3. Melakukan koordinasi dengan stakeholder atau pemangku kepentingan dalam rangka percepatan perikanan rajungan berkelanjutan;

4. kegiatan *Focus Group Discussion (FGD)*, *Mini Workshop* maupun *Webinar* dengan melibatkan perguruan tinggi maupun *NGO* dengan tujuan untuk menjalin dan menjangking kerjasama antar lembaga kementerian ataupun Lembaga riset non kementerian lainnya dengan tujuan untuk memperkuat pelaksanaan kegiatan teknis itu sendiri dan sebagai *recognized* Kelembagaan.

Kegiatan IK ini di dukung oleh anggaran BBRSEKP melalui kegiatan Manajerial “Pelayanan Kerja Sama Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan” dengan pagu anggaran sebesar Rp. 33.750.000,-.

Gambar 11. Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 6



Indikator Kinerja 7.

Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar BBRSEKP (%)

IK Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar BBRSEKP (%) ini didefinisikan sebagai bagaimana pengetahuan dapat di sampaikan atau disebarkan dalam suatu media. Ruang lingkup manajemen pengetahuan di Tahun 2019 diterjemahkan sebagai tingkat penerapan MP di Level 1 KKP, dihitung dari 3 variabel, yaitu : (i) Sharing dokumen, (ii) keikutsertaan , (iii) keaktifan Pejabat/staf unit kerja level 1 dalam Sistem Informasi MP yang terpilih.

Pada Tahun 2024 IKU manajemen pengetahuan yang terstandar KKP terjadi perubahan, dimana aplikasi pendukung manajemen pengetahuan sebelumnya menggunakan Bitrix24.com kini menjadi Collaboration Office dengan link <https://portal.kkp.go.id>. Berdasarkan nota dinas Plt. Kepala Pusdatin Nomor 2659/SJ.7/TU.210/IX/2024 perihal Implementasi Portal Collaboration Office Tahun 2024 dan Penyampaian perubahan Manual IKU Manajemen Pengetahuan Terstandar Lingkup KKP.

Tabel 16. Perubahan pengukuran indikator MP

Sebelum	Sesudah
Komponen penilaian: dokumen (20%) dan keaktifan (80%)	Komponen penilaian: keaktifan (100%)
Aplikasi Bitrix24	Aplikasi Collaboration Office
Maksimal nilai yang dapat diterima adalah 3	Maksimal nilai yang dapat diterima adalah 4
Pegawai yang wajib dinilai: Eselon 2, Koordinator, dan Subkoordinator lingkup pusat	Pegawai yang wajib dinilai: Eselon 2 dan Ketua Tim Kerja

Capaian IK Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar BBRSEKP (%) sebagai berikut:

Tabel 17. Capaian IK Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar BBRSEKP (%)

IKU-7. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar BBRSEKP (%)										
Realisasi TW I				2024					Renstra BBRSEKP 2020 – 2024 (180/2020)	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan TW I 2022-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
78.00	100	100.00	100.00	94	94	133.33	120.00	33.33	90	120

Capaian IKM Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar BBRSEKP (%) pada Triwulan I tahun 2024 mencapai 133.33% (120%) dari target 94. Capaian sesuai dengan Surat Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor B.3300 /BPPSDM.1/TU.210/IV/2024 tanggal 5 April 2024 tentang Capaian Nilai Akhir IKU MP Terstandar Lingkup KKP Triwulan I 2024.

Jika dibandingkan dengan capaian triwulan I tahun 2023, terjadi peningkatan sebesar 33.33%, jika dibandingkan dengan capaian kinerja 5 tahunan, untuk IK ini cukup stabil, namun karena adanya perubahan metode perhitungan pada aplikasi yang digunakan maka capaian pada tahun 2024 terjadi peningkatan capaian sebagaimana pada tabel 18, sedangkan perbandingan capaian kinerja terhadap target Renstra 2024 sebesar 120%.

Jika dibandingkan dengan satker sejenis di Lingkungan BPPSDMKP, antara BBRSEKP dengan BBRP2BKP, maka capaian pada BBRSEKP tidak lebih besar maupun kurang dari, karena capaian IK sama yaitu 133.33%, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 18. Perbandingan Capaian IK 6 dengan Satker Sejenis

Nama Satker	Capaian Keaktifan		
	Target TW I	Realisasi TW I	Persentase Capaian Tahun 2024
BBRSEKP	94	133.33	120
BBRP2BKP	94	133.33	120

Keberhasilan pencapaian IK Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar BBRSEKP (%) disebabkan antara lain:

1. Nilai terbesar diperoleh dari keaktifan karena Pimpinan BBRSEKP sudah berkontribusi dalam keaktifan pada aplikasi *Collaboration Office*;
2. Pimpinan BBRSEKP telah memberikan kontribusi pengetahuan berupa informasi dengan ketentuan 5W+1H, *infografis* dan video;
3. Kemudahan dalam mengakses Portal KKP

Kegiatan pendukung keberhasilan IK ini antara lain:

1. Mengakses dan mengupload kegiatan kedalam aplikasi *Collaboration Office*;
2. Mengikuti sosialisasi dan monitoring tentang tatacara penginputan pada aplikasi *Collaboration Office*;
3. Berkoordinasi dengan komunikasi langsung sebelum masa waktu triwulanan berakhir.

Kegiatan IK ini di dukung oleh anggaran BBRSEKP melalui kegiatan Manajerial “Layanan Data dan Sistem Informasi Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan” dengan pagu anggaran sebesar Rp. 99.850.000,-.

Gambar 12. Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 7



Ket : Rapat koordinasi lingkup Data dan Sistem Informasi

Ket : Pelatihan pengenalan platform aplikasi

Indikator Kinerja 8.

Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja BBRSEKP (Inovasi)

IK Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja BBRSEKP (Inovasi) merupakan terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Capaian IK Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja BBRSEKP (Inovasi) sebagai berikut:

Capaian IK 8 belum dapat diukur, karena capaian baru dapat diukur di akhir tahun.

Adapun progress pelaksanaan kegiatan sampai dengan triwulan I diantaranya:

1. Proses pengajuan proposal inovasi dan perbaikannya ke Set. BPPSDMKP
2. Koordinasi internal internal BBRSEKP dengan Kelompok Humas dan Kerjasama terkait penerapan hasil inovasi.
3. Melakukan perbaikan pada inovasi, yaitu perbaikan video register, submit, dan formatting naskah.

Kegiatan IK ini di dukung oleh anggaran BBRSEKP melalui kegiatan Manajerial "Pelayanan Tata Usaha dan Kerumahtanggaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan" dengan pagu anggaran sebesar Rp. 165.075.000,-.

Gambar 13. Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 8



Indikator Kinerja 9.

Persepsi Kepuasan Layanan Publik Sosial Ekonomi KP (Nilai)

IK Persepsi Kepuasan Layanan Publik Sosial Ekonomi KP (Nilai) merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Capaian IK Persepsi Kepuasan Layanan Publik Sosial Ekonomi KP (Nilai) sebagai berikut :

Tabel 19. Capaian IK 9 Persepsi Kepuasan Layanan Publik Sosial Ekonomi KP (Nilai)

IKU-9. Persepsi Kepuasan Layanan Publik Sosial Ekonomi KP (Nilai)										
Realisasi TW I				2024					Renstra BBRSEKP 2020 – 2024 (180/2020)	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan TW I 2022-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
-	-	-	-	88	75	89.58	119.44	-	88	102

Capain IK 9 Pada triwulan I Tahun 2024 capaian telah melebihi dari target yang telah di tetapkan yaitu dengan target 75 dan capaian 89.58 atau sama dengan 119.44%. Capaian sesuai dengan screenshoot aplikasi Susana KKP.

jika dibandingkan dengan capaian Triwulan I tahun 2023, untuk IK tidak dapat dibandingkan karena adanya perubahan metode pengukuran di tahun 2024 dimana semula tahunan menjadi triwulanan, jika dibandingkan dengan kinerja 5 tahunan, IK ini tidak dapat dibandingkan karena IK baru di bentuk di tahun 2023 untuk mengakomodir kegiatan pada BBRSEKP terkait Pelayanan Kerja Sama Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan., sedangkan perbandingan capaian kinerja terhadap target Renstra 2024 sebesar 102%.

Keberhasilan Persepsi Kepuasan Layanan Publik Sosial Ekonomi KP (Nilai) disebabkan antara lain adanya *software* layanan tentang aplikasi Susana, adanya kemudahan penilaian survey kepuasan masyarakat (SKM), serta adanya kemudahan akses kedalam aplikasi Susana.

Kegiatan pendukung keberhasilan IK ini antara lain membuat survey kepuasan masyarakat (SKM), mengolah data hasil penilaian survey, pelayanan yang baik dari tim pelayanan publik di BBRSEKP terhadap pengunjung serta adanya petugas kompten yang telah dibekali bimtek layanan prima.

Kegiatan IK ini di dukung oleh anggaran BBRSEKP melalui kegiatan Manajerial “Pelayanan Kerja Sama Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan” dengan pagu anggaran sebesar Rp. 33.750.000,-.

Gambar 14. Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 9



Indikator Kinerja 10.

Nilai IKPA BBRSEKP (Nilai)

Nilai IKPA BBRSEKP merupakan alat ukur untuk menentukan tingkat kinerja satker khususnya dalam pelaksanaan anggaran. Pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel yang terkait dengan pelaksanaan anggaran sebagai indikatornya, yaitu Penyerapan Anggaran (bobot 20%), Pengelolaan Uang Persediaan (10%) Penyelesaian Tagihan (20%) Deviasi Halaman IVI DIPA (11), Penyampaian Data Kontrak, Penyampaian LPJ Bendahara, Revisi DIPA, Pengembalian/Kesalahan SPM, Dispensasi SPM, Renkas/RPD Harian, Retur SP2D (masing masing 5%). Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) menjadi ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Capaian kinerja IK Nilai IKPA BBRSEKP pada triwulan I belum dapat diukur, karena capaian baru dapat di ukur di Triwulan II atau Semester I dan akhir tahun.

Progress kegiatan sampai dengan triwulan I antara lain:

1. Penginputan aplikasi SAS periode Jan-Maret Tahun 2024
2. Pengelola keuangan periode pengajuan SPM GUP dari SP2D UP/GUP;
3. Proses dokumen pembayaran SPM;
4. Berkoordinasi dengan KPPN terkait retur SP2D;
5. Revisi halaman III DIPA untuk penyesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD);
6. Perbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan sesuai dengan jadwal, agar tidak penumpukan pencairan anggaran pada akhir tahun;

Kegiatan IK ini di dukung oleh anggaran BBRSEKP melalui kegiatan Manajerial “Pelayanan Keuangan dan Perbendaharaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan” dengan pagu anggaran sebesar Rp. 83.500.000,-.

Gambar 15. Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 10



Indikator Kinerja 11.

Nilai Kinerja Anggaran BBRSEKP (Nilai)

IK Nilai Kinerja Anggaran BBRSEKP (Nilai) merupakan: a). Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-K/L melalui aplikasi SMART DJA. Cakupan evaluasi kinerja melalui Aspek Implementasi, Aspek Manfaat dan Aspek Konteks; b). Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya; c). Aspek Manfaat adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai perubahan yang terjadi dalam pemangku kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program program Kementerian/Lembaga; d). Aspek Konteks adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang digunakan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai kualitas informasi yang tertuang dalam dokumen RKA-K/L termasuk relevansinya perkembangan keadaan kebijakan Pemerintah.

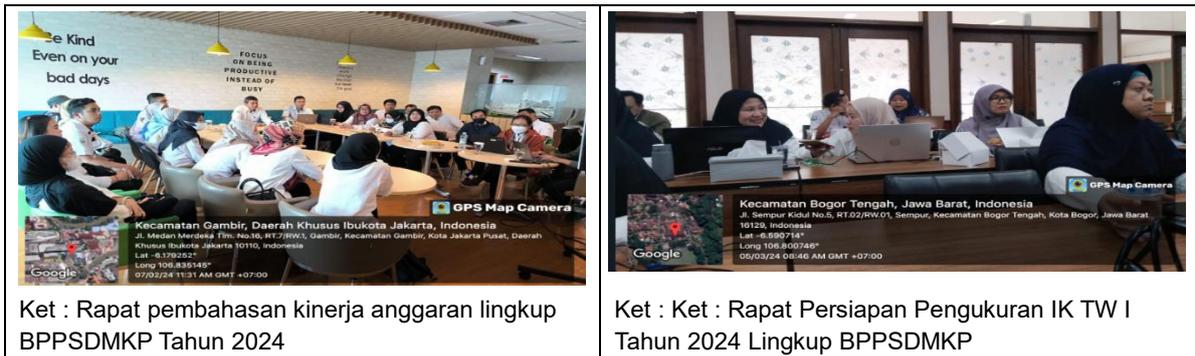
Capaian Nilai Kinerja Anggaran BBRSEKP (Nilai) belum dapat diukur, karena capaian baru dapat diukur diakhir tahun

Progress pelaksanaan kegiatan sampai dengan triwulan I diantaranya input capaian output pada aplikasi omspan yang terintegrasi dengan smart dja, berkoordinasi dengan biro keuangan terkait nilai penilaian efisiensi, serta monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran di BBRSEKP.

Kegiatan IK ini di dukung oleh anggaran BBRSEKP melalui kegiatan Manajerial "Pelayanan Perencanaan dan Penganggaran Internal Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan

Perikanan” dengan pagu anggaran sebesar Rp. 115.614.000,-. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 111,400,000,-.

Gambar 16. Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 11



Ket : Rapat pembahasan kinerja anggaran lingkup BPPSDMKP Tahun 2024

Ket : Ket : Rapat Persiapan Pengukuran IK TW I Tahun 2024 Lingkup BPPSDMKP

Indikator Kinerja 12.

Nilai Rekonsiliasi Kinerja Balai Besar Riset Sosial Ekonomi KP (Nilai)

IK Nilai Rekonsiliasi Kinerja Balai Besar Riset Sosial Ekonomi KP (Nilai) merupakan Proses evaluasi cepat terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja.

Rekonsiliasi kinerja dilakukan untuk Meningkatkan pemahaman para pengelola kinerja di seluruh satuan kerja KKP, Menjadi sarana bersama untuk mengidentifikasi terhadap perubahan dan perkembangan pengelolaan kinerja untuk mengawal SAKIP menjadi lebih baik.

Capaian IK Nilai Rekonsiliasi Kinerja Balai Besar Riset Sosial Ekonomi KP (Nilai) pada triwulan I belum dapat diukur karena capaian baru dapat di ukur di akhir tahun.

Progress Kegiatan pendukung IK ini sampai dengan triwulan I, antara lain input capaian kinerja kedalam aplikasi kinerjajaku, menyusun dokumen perencanaan meliputi PK, manual IK, rencana aksi, rincian target iku, menyusun laporan kinerja, validasi dan verifikasi capaian kinerja, serta reuiu kinerja di lingkungan BBRSEKP maupun internal.

Kegiatan IK ini di dukung oleh anggaran BBRSEKP melalui kegiatan Manajerial “Pelayanan Monitoring dan Evaluasi Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan” dengan pagu anggaran sebesar Rp. 67.800.000,-.

Gambar 17. Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 12



Ket : Pengukuran capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024

Ket : Rapat validasi dan verifikasi capaian kinerja TW I serta Penyusunan Laporan Kinerja TW I Lingkup BPPSDMKP Tahun 2024

Indikator Kinerja 13.

Penilaian Mandiri SAKIP BBRSEKP (Nilai)

IK Penilaian Mandiri SAKIP BBRSEKP (Nilai) merupakan Nilai Penilaian Mandiri yang dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di BBRSEKP.

Dalam rangka evaluasi tingkat akuntabilitas, Inspektorat Jenderal KKP melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada masing-masing unit eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan, sementara Kementerian PANRB melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada tingkat kementerian Pusat/ daerah. Penilaian SAKIP di lingkup KKP sampai dengan tahun 2021, dilakukan berdasarkan Permen PAN RB 12 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan pada tahun 2024 penilaian SAKIP menggunakan peraturan baru dengan terbitnya Permen PAN RB nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perubahan mendasar dalam penilaian SAKIP yaitu adanya penggabungan dan pembobotan dalam komponen penilaian, keselarasan cascading untuk melihat keselarasan kinerja organisasi, sistem reward and punishment, penambahan kriteria penilaian dari 5 menjadi 8 kriteria, serta orientasi penilaian lebih kearah dampak implementasi SAKIP atau outcome.

Capaian IK Penilaian Mandiri SAKIP BBRSEKP (Nilai) pada triwulan I belum dapat diukur karena capaian baru dapat diukur di akhir tahun.

Progress kegiatan sampai dengan triwulan I antara lain, menyusun dokumen evaluasi rencana aksi, upload dokumen SAKIP kedalam aplikasi SAKIPPANRB, monitoring dan evaluasi kegiatan internal secara periodik, serta berkoordinasi secara intensive dengan Koordinator Monev di BPPSDMKP.

Kegiatan IK ini di dukung oleh anggaran BBRSEKP melalui kegiatan Manajerial "Penyusunan Pelaporan Kinerja Satker" dengan pagu anggaran sebesar Rp. 40.000.000,-.

Gambar 18. Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 13



Ket : Reviu Laporan Kinerja Tahun 2024 sebagai dasar penilaian SAKIP

Ket : Rapat Penjenjangan Perjanjian Kinerja revisi Tahun 2024 dengan Biro Perencanaan.

Indikator Kinerja 14.

Persentase Realisasi Anggaran BBRSEKP (%)

IK Persentase Realisasi Anggaran BBRSEKP (%) merupakan laporan yang menggambarkan selisih antara jumlah yang dianggarkan di awal periode dengan jumlah yang telah direalisasi diakhir periode.

Capaian IK Persentase Realisasi Anggaran BBRSEKP (%) sebagai berikut :

Tabel 20. Capaian IK 14 Persentase Realisasi Anggaran BBRSEKP (%)

IKU-14.Persentase Realisasi Anggaran BBRSEKP (%)										
Realisasi TW I				2024					Renstra BBRSEKP 2020 – 2024 (180/2020)	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan TW I 2022-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
-	-	-	18.62	98	15	21.29	120.00	14.34	99	21.51

Capain IK 14 Pada Triwulan I Tahun 2024 capaian telah melebihi dari target yang telah di tetapkan yaitu dengan target 15 dan capaian 21.29% atau sama dengan 120%. Capaian sesuai dengan surat Balai Besar Riset Sosial Ekonomi KP nomor B.57/BBRSEKP/TU.210/IV/2024 tanggal 3 April 2024 tentang Capaian IKU Persentase Realisasi Anggaran BBRSEKP (%).

Jika dibandingkan dengan capaian Triwulan I tahun 2023, untuk IK mengalami peningkatan capaian sebesar 14.34%, jika dibandingkan dengan kinerja 5 tahunan, IK ini tidak dapat dibandingkan karena IK baru di bentuk di tahun 2023 untuk mengakomodir kegiatan pada BBRSEKP terkait Penyusunan Pelaporan Kinerja Satker, sedangkan perbandingan capaian kinerja terhadap target Renstra 2024 sebesar 21.51%.

Keberhasilan capaian indikator ini antara lain adanya komunikasi yang terjalin dengan baik antara pengelola keuangan dengan penanggungjawab kegiatan, komunikasi yang terjalin dengan baik antara BBRSEKP dengan mitra KPPN VI Jakarta, penyelesaian SPM secara tepat waktu sesuai dengan jadwal, pembayaran gaji dan tunjangan secara tepat waktu, dan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana operasional kegiatan.

Kegiatan pendukung keberhasilan IK ini antara lain rapat internal pengawalan rencana penarikan dana, monitoring dan evakuasi kegiatan secara berkala, berkoordinasi dengan mitra KPPN Jakarta VI.

Kegiatan IK ini di dukung oleh anggaran BBRSEKP melalui kegiatan Manajerial “” dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.300.000.000,-.

Gambar 19. Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 14



Indikator Kinerja 15. Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BBRSEKP(%)

IK Batas Tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BBRSEKP(%) merupakan Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK BRSDM merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Indikator batas tertinggi persentase temuan LHP BPK atas laporan keuangan (LK) BBRSEKP dibandingkan realisasi anggaran sesuai dengan yang ditetapkan biro keuangan KKP.

Dalam rangka evaluasi tingkat akuntabilitas, Inspektorat Jenderal KKP melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada masing-masing unit eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan, sementara Kementerian PANRB melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja

pada tingkat kementerian Pusat/ daerah. Penilaian SAKIP di lingkup KKP sampai dengan tahun 2021, dilakukan berdasarkan Permen PAN RB 12 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan pada tahun 2024 penilaian SAKIP menggunakan peraturan baru dengan terbitnya Permen PAN RB nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perubahan mendasar dalam penilaian SAKIP yaitu adanya penggabungan dan pembobotan dalam komponen penilaian, keselarasan cascading untuk melihat keselarasan kinerja organisasi, sistem reward and punishment, penambahan kriteria penilaian dari 5 menjadi 8 kriteria, serta orientasi penilaian lebih kearah dampak implementasi SAKIP atau outcome.

Capaian IK Batas Tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BBRSEKP (%) pada triwulan I belum dapat diukur karena capaian baru dapat diukur di akhir tahun.

Progress kegiatan sampai dengan triwulan I, antara lain penyusunan laporan keuangan, update rekening (saldo dan rekening koran) serta rapat internal terkait pelaporan keuangan BBRSEKP.

Kegiatan IK ini di dukung oleh anggaran BBRSEKP melalui kegiatan Manajerial “Perencanaan/Implementasi/Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah” dengan pagu anggaran sebesar Rp. 14.000.000,-.

Gambar 20. Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 15



Indikator Kinerja 16.

Jurnal Sosial Ekonomi yang Ter-akreditasi (Indeks Jurnal)

IK Jurnal Sosial Ekonomi yang Ter-akreditasi (Indeks Jurnal) merupakan sarana di berbagai forum dan media untuk mempublikasikan teks artikel ilmiah baik teks artikel konseptual, artikel penelitian dan artikel ilmiah populer, diantaranya yaitu Jurnal ilmiah, bulletin dan prosiding.

Berdasarkan Permen Ristek Dikti No.6/2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah dijelaskan bahwa jurnal dikatakan terakreditasi apabila proses akreditasi jurnal ilmiah dilakukan secara

elektronik melalui jejaring teknologi informasi dan komunikasi. Dengan kata lain, jurnal yang diterbitkan memiliki E-ISSN dan pengenal objek digital (Digital Object Identifier/DOI) agar dapat ditelusuri, secara transparan dapat diperiksa terutama terkait dengan plagiarisme atau agar tidak terjadi tumpang tindih pengembangan keilmuan, dan meningkatkan daya baca (disitasi). Akreditasi jurnal ilmiah berlaku untuk masa 5 (lima) tahun

Capaian IK Jurnal Sosial Ekonomi yang Ter-reakreditasi (Indeks Jurnal) pada triwulan I tahun 2024 belum dapat dicapai, karena capaian baru dapat di ukur di akhir tahun.

Progress kegiatan sampai dengan triwulan I untuk IK ini antara lain berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan untuk pembahasan terkait dengan pengusulan, menyusun dokumen usulan pengelolaan dan penilaian ulang jurnal sosial ekonomi.

Kegiatan IK ini di dukung oleh anggaran BBRSEKP melalui kegiatan Manajerial “Pelayanan Pengelolaan Jurnal” dengan pagu anggaran sebesar Rp. 98.850.000,-.

Gambar 21. Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 16



Indikator Kinerja 17.

Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRSEKP (%)

IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRSEKP (%) merupakan Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang terbit pada periode 1 Oktober s.d 30 September atau Triwulan IV s.d Triwulan III yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindaklanjut lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh mitra kerja yang menjadi obyek pengawasan.

Rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang sudah ditindaklanjuti oleh BBRSEKP secara tuntas (tindaklanjut adalah TUNTAS) sebanyak 80% dari seluruh rekomendasi yang diberikan selama periode pengukuran.

Capaian IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRSEKP (%) sebagai berikut :

Tabel 21. Capaian IK 17 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRSEKP (%)

IKU-17. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRSEKP (%)										
Realisasi TW I				2024					Renstra BBRSEKP 2020 – 2024 (180/2020)	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Penurunan TW I 2022-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
100.00	100.00	100.00	75.00	82	82	71.43	87.11	95.24	82	87.11

Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRSEKP (%) pada triwulan I tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan pada rencana aksi, dengan target 82 dan capaian 71.43 atau sama dengan 87.11%. Capaian sesuai dengan surat Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor: B.3334/BPPSDM.1/KU.520/IV/2024 tanggal 17 April 2024 tentang penyampaian capaian persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPPSDMKP triwulan I Tahun 2024.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 terjadi penurunan capaian sebesar 95.24%, jika dibandingkan dengan kinerja 5 tahunan untuk IK ini cukup stabil, jika dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 mencapai 87.11%.

Gambar 22. Data Rekapitulasi Capaian IKU 16 sesuai surat BPPSDMKP Nomor B.3334/BPPSDM.1/KU.520/IV/2024 tanggal 17 April 2024

Lampiran II
 Nomor : B.3334/BPPSDM.1/HP.510/IV/2024
 Tanggal : 17 April 2024

**Data Rekapitulasi Capaian IKU
 Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPPSDM KP
 Triwulan I Tahun 2024**

No	Satker Pusat	Temuan Awal (saran)	Tindak Lanjut (saran)	%
1	Sekretariat	41	41	100,00
2	Pusriskan	9	9	100,00
3	Pusriskel	0	0	82,00
4	Pusdik KP	0	0	82,00
5	Puslatluh KP	0	0	82,00
6	BBRP2BKP	2	-	
7	BBRSEKP	7	5	71,43
	TOTAL	59	55	93,23

Sumber Data: Surat BPPSDMKP

Jika dibandingkan dengan satker sejenis di BPPSDMKP lainnya, antara BBRSEKP dengan BBRP2BKP, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 22. Perbandingan Capaian IK 17 dengan satker sejenis

Capaian IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRSEKP (%)			
Satker	Target	Realisasi	Persentase
BBRSEKP	82	71.43	87.11%
BBRP2BKP	80	-	0.00%

Kegagalan atas pencapaian IK ini antara lain adanya 7 temuan atas laporan keuangan pada BBRSEKP dimana sampai dengan akhir periode triwulan I, dari 7 temuan selesai di tindak lanjuti sebanyak 5 temuan atau sama dengan 71.43% sehingga terdapat sisa 2 temuan yang akan diselesaikan sebelum pengukuran pada triwulan berikutnya.

Kegiatan pendukung IK ini antara lain koordinasi dengan Inspektorat Jenderal KKP, Biro Keuangan KKP dan Koordinator Keuangan di BPPSDMKP, serta adanya rapat dan pengawasan internal di BBRSEKP.

Kegiatan IK ini di dukung oleh anggaran BBRSEKP melalui kegiatan Manajerial “Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Internal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan” dengan pagu anggaran sebesar Rp. 17.500.000,-.

Gambar 23. Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 17



Indikator Kinerja 18.

Nilai Minimal yang Diperkirakan untuk Mempertahankan Predikat WBK/WBBM yang Lolos Penilaian Menuju Wilayah Bebas Korupsi (Nilai)

IK Nilai Minimal yang Diperkirakan untuk Mempertahankan Predikat WBK/WBBM yang lolos Penilaian Menuju Wilayah Bebas Korupsi (Nilai) yang lolos Penilaian Menuju Wilayah Bebas Korupsi (Nilai) merupakan predikat yang diberikan kepada unit kerja pada instansi pemerintah yang memenuhi indikasi bebas dari korupsi dan melayani publik dengan baik.

Capaian IK Nilai Minimal yang Diperyaratkan untuk Mempertahankan Predikat WBK/WBBM yang lolos Penilaian Menuju Wilayah Bebas Korupsi (Nilai) pada tahun 2024 mencapai 85,17 dari target 84 atau sama dengan 100%.

Capaian indikator ini sampai dengan triwulan I belum dapat dihitung, karena capaian baru dapat diukur diakhir tahun.

Progress kegiatan sampai dengan triwulan I untuk IK ini antara lain koordinasi dengan Set. BPPSDMKP, serta adanya rapat dan penilaian tim di internal BBRSEKP.

Kegiatan IK ini di dukung oleh anggaran BBRSEKP melalui kegiatan Manajerial “Pelayanan Kepatuhan Birokrasi Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan” dengan pagu anggaran sebesar Rp. 30.000.000

Gambar 24. Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 18



Indikatorl Kinerja 19.

Persentase Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BBRSEKP (%)

IK Persentase Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BBRSEKP (%) merupakan Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Unit Eselon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN BBRSEKP diukur berdasarkan (i) Tersedianya dokumen rencana kebutuhan BMN (RKMBN) Tahun 2024; (ii) Tersedianya dokumen usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi rusak; (iii) Penyusunan laporan BMN secara tepat waktu;

Capaian IK Persentase Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BBRSEKP (%) pada triwulan I tahun 2024 belum dapat dihitung karena capaian baru dapat diukur di akhir tahun.

Progress kegiatan sampai dengan triwulan I untuk IK ini antara lain Menyampaikan Daftar Permintaan BPK RI terkait Data Pemanfaatan Aset oleh Pihak ketiga, Data Aset Tetap

berupa Properti Investasi, Daftar Aset Tetap Kendaraan Bermotor pada Satuan Kerja Balai Besar Riset Sosial Ekonomi KP pada tanggal 18 Januari 2024, Melakukan Persiapan Rekonsiliasi dan Penyusunan Internal berupa Lapoan Persediaan, BMN, dan Laporan Keuangan melalui Aplikasi SAKTI dan MonSakti periode 31 Desember 2023 pada Satuan Kerja Balai Besar Riset Sosial Ekonomi KP pada tanggal 19 Januari 2024 serta Menghadiri Rekonsiliasi Laporan Keuangan dan BMN Tahun Anggaran 2023 lingkup BPPSDMKP pada tanggal 22-26 Januari 2024 di Hotel Swissbel Solo, Jawa Tengah.

Kegiatan IK ini di dukung oleh anggaran BBRSEKP melalui kegiatan Manajerial “Pemeliharaan kantor dan Pembayaran terkait Pelaksanaan Operasional Kantor” dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2,195.160.000,-.

Gambar 25. Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 19



Indikator Kinerja 20.

Layanan Perkantoran BBRSEKP (%)

IK Layanan Perkantoran BBRSEKP (%) merupakan tersusunnya laporan layanan perkantoran di BBRSEKP meliputi dokumen Rencana Operasional Kegiatan dan Laporan Layanan Perkantoran diantaranya (i) Dokumen Laporan Layanan Perkantoran; (ii) Dokumen Laporan Layanan Hubungan Masyarakat; (iii) Dokumen Laporan Layanan Umum; (iv) Dokumen Laporan Layanan Data Dan Informasi; (v) Dokumen Laporan Layanan Manajemen SDM; (vi) Dokumen Laporan Layanan Perencanaan Dan Penganggaran; (vii) Dokumen Laporan Monitoring Dan Evaluasi; (viii) Dokumen Laporan Manajemen Keuangan

Capaian IK Layanan Perkantoran BBRSEKP (%) sebagai berikut :

Tabel 23. Capaian IK 20 Persentase Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I

IKU-20. Layanan Perkantoran BBRSEKP (%)										
Realisasi TW I				2024					Renstra BBRSEKP 2020 – 2024 (180/2020)	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan TW I 2022-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
-	-	100.00	100.00	100	100	100	100.00	100.00	100	100.00

Capaian IK Layanan Perkantoran BBRSEKP (%) pada triwulan I tahun 2024 mencapai 100 dari target 100 atau sama dengan 100%. Capaian ini sesuai dengan surat Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Nomor B. 60/BBRSEKP/TU.210/IV/2024 tanggal 3 April 2024

Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya untuk IK ini tidak mengalami peningkatan maupun penurunan capaian atau sama dengan stabil, jika dibandingkan dengan kinerja 5 tahunan untuk IK ini tidak dapat dibandingkan karena IK baru dibentuk di tahun 2022, jika dibandingkan dengan target jangka menengah Renstra capaian 100%.

Jika dibandingkan dengan satker sejenis di BPPSDMKP lainnya, antara BBRSEKP dengan BBRP2BKP, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 24. Perbandingan Capaian IK 20 dengan satker sejenis

Capaian IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRSEKP (%)			
Satker	Target	Realisasi	Persentase
BBRSEKP	100	100	100%
BBRP2BKP	25	25	100%

Keberhasilan atas pencapaian IK ini antara lain adanya pengawalan kegiatan secara intensif atas pelaksanaan kegiatan di BBRSEKP, terjalin komunikasi yang baik antar koordinator di BBRSEKP .

Kegiatan pendukung keberhasilan IK ini antara penyusunan laporan periodik (triwulana), Rapat internal pembahasan kegiatan dan monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan IK ini di dukung oleh anggaran BBRSEKP melalui kegiatan Manajerial “Kebutuhan sehari-hari perkantoran” dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1,313,3150,000,-.

Gambar 26. Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 20



3.3 Realisasi Keuangan BBRSEKP Triwulan I Tahun 2024

Penyerapan Pencapaian kinerja akuntabilitas keuangan Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Keluatan dan Perikanan secara umum berhasil mencapai sasaran kegiatan yang ditetapkan dengan baik. Anggaran BBRSEKP pada tahun 2024 disusun berdasarkan variable jenis pengeluaran dan variable kegiatan. Variabe pengeluaran yaitu belanja pegawai dan belanja barang. Sedangkan variable kegiatan adalah kegiatan dukungan manajemen.

Pagu anggaran BBRSEKP dalam DIPA TA. 2024 adalah Rp. 12.300.000.000,-. Yang terdiri dari (1) Belanja Pegawai dengan pagu anggaran sebesar Rp. 8.000.000.000,- dan Belanja Barang dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.300.000.000,- dengan realisasi anggaran sampai dengan 31 Maret 2024 sebesar Rp. 2.363.744.548,-. Atau sama dengan 19,22%

Tabel 25. Capaian Pagu dan Realisasi Anggaran Perjenis Belanja Tahun 2024

JENIS BELAJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Belanja Pegawai	Rp.8.000.000.000,-	Rp.1.760.839.657,-	22.01%
Belanja Barang	Rp.4.300.000.000,-	Rp. 602.904.891,-	14.02%
TOTAL	Rp.12.300.000.000,-	Rp. 2.363.744.548,-	19.22%

Tabel 26. Capaian Pagu dan Realisasi Anggaran per Sasaran Tahun 2024

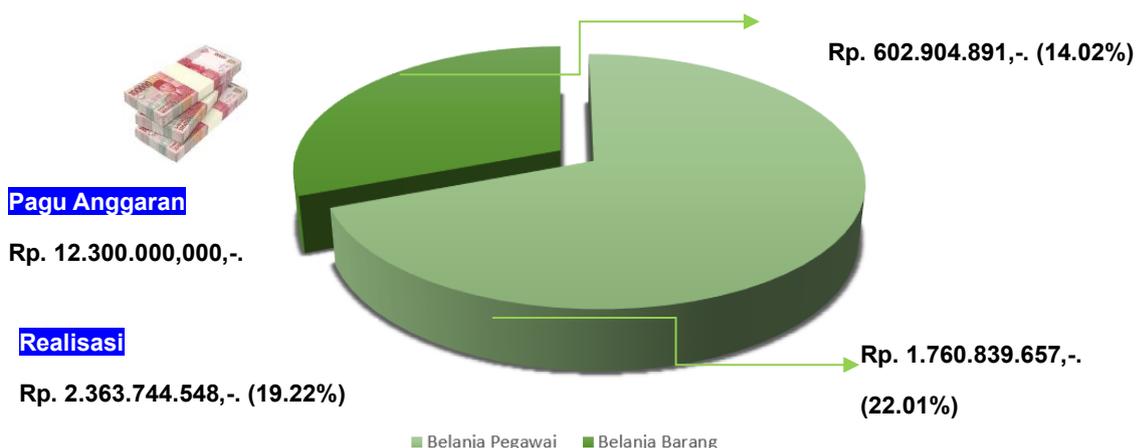
NO	SASARAN KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Tersedianya Perumusan Kebijakan KP yang digunakan untuk Penyusunan Kegiatan	Rp.3.000.000.000,-	-	-
2	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	Rp. 11.300.000.000,-	Rp. 2.363.744.548,-	19.22%

Tabel 27. Capaian Pagu dan Realisasi Anggaran per IK Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Pagu (000)	Realisasi (000)	%
1	Tersedianya Perumusan Kebijakan KP yang digunakan untuk Penyusunan Kegiatan	1 Hasil Perumusan Kebijakan Responsif KP yang digunakan untuk Penyusunan Kebijakan (Rekomenjak)	Rp. 1000.000,-	Rp. -	-
2	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	2 Indeks Profesional ASN Lingkup BBRSEKP (Indeks)	Rp.42.000,-	Rp.7.948,-	18.93%
		3 Persentase Peningkatan Kapasitas SDM BBRSEKP (%)	Rp.88.000,-	Rp.-	
		4 Persentase Dokumen Bahan Pimpinan yang Dimanfaatkan (%)	Rp.90.700,-	Rp.7.771,-	8.57%
		5 Persentase Efektifitas penyebarluasan informasi kegiatan Sosial Ekonomi KP (%)	Rp.12.500,-	Rp.-	-
		6 Kerjasama Eselon I yang ditindaklanjuti oleh BBRSEKP (Paket)	Rp.33.750,-	Rp.2.774,-	8.22%
		7 Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar BBRSEKP (%)	Rp.54.215,-	Rp.3.320,-	6.12%
		8 Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja BBRSEKP	Rp.165.075,-	Rp.53.812,-	32.60%
		9 Persepsi Kepuasan Layanan Publik Sosial Ekonomi KP	Rp.12.600,-	Rp.2.100,-	16.67
		10 Nilai IKPA BBRSEKP (Nilai)	Rp.83.500,-	Rp.34.371,-	41.16%
		11 Nilai Kinerja Anggaran	Rp.111.400,-	Rp.30.881,-	27.72%
		12 Nilai Rekonsiliasi Kinerja Balai Besar	Rp.67.800,-	Rp.12.973,-	19.13%

		Riset Sosial Ekonomi KP (Nilai)			
	13	Nilai PM SAKIP BBRSEKP (Nilai)	Rp.40.000,-	Rp.-	-
	14	Persentase Realisasi Anggaran BBRSEKP (%)	Rp.8.000.000,-	Rp.1.760.839,-	22.01%
	15	Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK atas LK BBRSEKP Dibandingkan Realisasi Anggaran BBRSEKP (%)	Rp.14.000,-	Rp.-	-
	16	Jurnal Sosial Ekonomi yang Ter-reakreditasi (Indeks Jurnal)	Rp.99.850,-	Rp.7.916,-	7.93%
	17	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan BBRSEKP yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	Rp.17.500,-	Rp.850,-	4.86%
	18	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Mempertahankan Predikat WBK/WBBM yang lolos Penilaian Menuju Wilayah Bebas Korupsi (Nilai)	Rp.30.000	Rp.15.270,-	50.90%
	19	Persentase Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BBRSEKP (%)	Rp.336.746,-	Rp.59.869,-	17.78%
	20	Layanan Perkantoran BBRSEKP (%)	Rp.1.313.315,-	Rp.270.612,-	20.61%
Total Realisasi Anggaran Tahun 2024			12,300,000,-	2,363,744,-	19.22%

Gambar 27 : Sebaran Realisasi BBRSEKP berdasarkan Variabel Pengeluaran



Realisasi anggaran berdasarkan output dapat dilihat pada gambar 25. Output dari kegiatan utama BBRSEKP yaitu kegiatan layanan dukungan manajemen direalisasikan sebesar 20.90% atau senilai Rp.2.363.744.548,- yang mencakup:

- 1) Analisis Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Rp.- (%) (Kegiatan Blokir AA)
- 2) Layanan Dukungan Manajemen Internal, Rp. 2.363.744.548,- (19.22%);

Gambar 28. Pagu dan Realisasi Anggaran berdasarkan Klasifikasi Rincian Output (KRO) BBRSEKP Tahun

Kode & Nomenkelatur	Pelaksanaan (% Kumulatif)	Anggaran			Kelengkapan												
		Alokasi	Realisasi	%	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	
2378 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	26.04	11,300,000,000	2,363,744,548	20.9	●	●	●	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
6706 Analisis Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan		1,000,000,000	0	0.0	●	●	●	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

Sumber Data : Aplikasi E-Monev Bappenas

Secara umum rincian capaian realisasi anggaran dan fisik berdasarkan IK utama dan pendukung IK Tahun 2024 didapat dari hasil perhitungan berdasarkan pada aplikasi e-monev bappenas diperoleh rerata realisasi capaian fisik sebesar 20.90% dari realisasi anggaran 19.22% sebagaimana pada gambar berikut :

Gambar 29. Sebaran Kategori Pelaksanaan Kegiatan dan Pemanfaatan pada BBRSEKP Tahun 2024



Sumber Data : Aplikasi E-Monev Bappenas

3.4 Efisiensi Anggaran dan Alokasi Sumber Daya BBRSEKP

A. Efisiensi Anggaran

BBRSEKP sebagai organisasi sektor publik dituntut untuk memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya. Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam arti mencapai tujuan dan sasaran (maximizing benefits and minimizing costs), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga disebutkan bahwa evaluasi kinerja anggaran terdiri atas evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi, evaluasi kinerja anggaran atas aspek manfaat dan evaluasi kinerja atas aspek konteks. Evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi dilaksanakan untuk kinerja anggaran tingkat eselon I/program dan tingkat satuan kerja/kegiatan. Evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel: capaian keluaran, penyerapan anggaran, efisiensi dan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan.

Efisiensi terdiri atas efisiensi keluaran (output) Program untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat unit Eselon I/program dan efisiensi keluaran (output) kegiatan untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat satuan kerja/kegiatan. Dalam rangka penghitungan efisiensi data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi keluaran program dan efisiensi keluaran output kegiatan meliputi: data capaian keluaran program, data capaian keluaran kegiatan, pagu anggaran dan realisasi anggaran. Efisiensi

dihitung dengan cara membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan pengeluaran sebenarnya dengan pengeluaran seharusnya.

Secara efisiensi, sampai dengan triwulan I belum tergambar capaian atas efisiensi dikarenakan perhitungan efisiensi baru dapat diukur akhir tahun.

Pencapaian nilai efisiensi dengan rentang -20 atau +20 menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran dinilai cukup efisien dan kegiatan telah berjalan dengan cukup baik, namun kondisi ini perlu mendapat perhatian dan pengawasan secara baik dalam rangka peningkatan kinerja dan konsistensi terhadap pelaksanaan kegiatan di triwulan berikut.



BAB 4

Penutup

4.1 Kesimpulan

4.2 Permasalahan Dan Rekomendasi

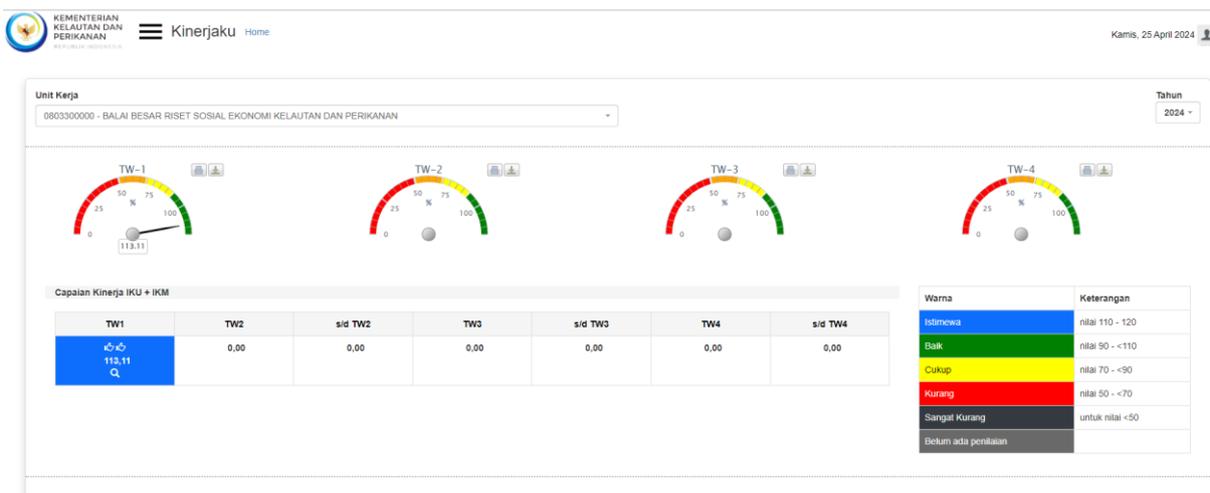


BAB IV

KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Pengukuran capaian kinerja BBRSEKP triwulan I tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja (*key performance indicator*, disingkat KPI) pada masing – masing Sasaran Strategis (SS). Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *balance scorecard* dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu pada <http://Kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja BBRSEKP di tingkat satker tiwulan I tahun 2024 sebesar **113,11%**, sebagaimana dashboard kinerjaku sebagai berikut:



Sumber : Dashboard Aplikasi Kinerjaku

Selama triwulan I tahun 2024 dari 20 IK BBRSEKP, terdapat 7 IK berstatus istimewa (biru), dan terdapat 1 IK berstatus baik (hijau) dan cukup (kuning), serta untuk indikator lain akan di ukur di triwulan berikutnya . Rincian target dan realisasi 9 IK tersebut adalah:

1. Persentase Peningkatan Kapasitas SDM BBRSEKP (%) dengan target sebesar 15% dengan capaian sebesar 16.67% atau sama dengan 111,13%
2. Persentase Dokumen Bahan Pimpinan yang Dimanfaatkan (%) dengan target sebesar 65% dan capaian sebesar 100% atau sama dengan 120%
3. Persentase Efektifitas penyebarluasan informasi kegiatan Sosial Ekonomi KP (%) dengan target sebesar 60% dan capaian sebesar 152% atau sama dengan 120%
4. Kerjasama Eselon I yang ditindaklanjuti oleh BBRSEKP (Paket) dengan target sebesar 2 paket dan capaian sebesar 3 paket atau sama dengan 120%

5. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar BBRSEKP (%) dengan target sebesar 94% dan capaian sebesar 133,33% atau sama dengan 120%
6. Persepsi Kepuasan Layanan Publik Sosial Ekonomi KP (Nilai) dengan target senilai 75 dan capaian senilai 89.58 atau sama dengan 119,44%
7. Persentase Realisasi Anggaran BBRSEKP (%) dengan target sebesar 15% dan capaian sebesar 21.29% atau sama dengan 120%
8. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRSEKP (%) dengan target sebesar 82% dan capaian sebesar 71.43% atau sama dengan 87.11%
9. Layanan Perkantoran BBRSEKP (%) dengan target sebesar 100% dan capaian sebesar 100% atau sama dengan 100%

Tabel 24. Rincian target dan realisasi atas 20 IK sebagai berikut :

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target TW I 2024	Capaian TW I 2024	% Capaian
1	Tersedianya Perumusan Kebijakan KP yang digunakan untuk Penyusunan Kegiatan	1 Hasil Perumusan Kebijakan Responsif KP yang digunakan untuk Penyusunan Kebijakan (Rekomenjak)	-	-	-
2	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	2 Indeks Profesional ASN Lingkup BBRSEKP (Indeks)	-	-	-
		3 Persentase Peningkatan Kapasitas SDM BBRSEKP (%)	15	16,67	111,13
		4 Persentase Dokumen Bahan Pimpinan yang Dimanfaatkan (%)	65	100	120
		5 Persentase Efektifitas penyebarluasan informasi kegiatan Sosial Ekonomi KP (%)	60	152	120
		6 Kerjasama Eselon I yang ditindaklanjuti oleh BBRSEKP (Paket)	2	3	120
		7 Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar BBRSEKP (%)	94	133,33	120
		8 Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja BBRSEKP	-	-	-
		9 Persepsi Kepuasan Layanan Publik Sosial Ekonomi KP	75	89,58	119,44
		10 Nilai IKPA BBRSEKP (Nilai)	-	-	-
		11 Nilai Kinerja Anggaran BBRSEKP (Nilai)	-	-	-
		12 Nilai Rekonsiliasi Kinerja Balai Besar Riset Sosial Ekonomi KP (Nilai)	-	-	-
		13 Nilai PM SAKIP BBRSEKP (Nilai)	-	-	-

	14	Persentase Realisasi Anggaran BBRSEKP (%)	15	21,29	120
	15	Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK atas LK BBRSEKP Dibandingkan Realisasi Anggaran BBRSEKP (%)	-	-	-
	16	Jurnal Sosial Ekonomi yang Ter-reakreditasi (Indeks Jurnal)	-	-	-
	17	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan BBRSEKP yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	82	71,43	87,11
	18	Nilai Minimal yang Diperyaratkan untuk Mempertahankan Predikat WBK/WBBM yang Lolos Penilaian Menuju Wilayah Bebas Korupsi (Nilai)	-	-	-
	19	Persentase Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BBRSEKP (%)	-	-	-
	20	Layanan Perkantoran BBRSEKP (%)	100	100	100

4.2 Permasalahan Dan Rekomendasi

Secara umum, pencapaian kinerja BBRSEKP adalah baik. Hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja, yang dapat tercapai semuanya, bahkan beberapa melebihi target yang ditetapkan serta realisasi anggaran yang tinggi.

Dari sisi akuntabilitas keuangan, realisasi anggaran BBRSEKP selama Triwulan I Tahun 2024 sebesar Rp. Rp. 2.363.744.548,- dari pagu anggaran Rp. 12.300.000.000,-. Dengan demikian, pencapaian kinerja output BBRSEKP dapat tercapai dengan dukungan anggaran sebesar 21,29% dari pagu.

Jika dilihat berdasarkan Sasaran Kegiatan (SK), maka satu dari dua SK tercapai melebihi target atau **"ISTIMEWA"**, yaitu "Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker" (120%); Capaian kinerja satu SK lainnya masuk kategori **"Belum Terdapat Penilaian"** yaitu Tersedianya Perumusan Kebijakan KP yang digunakan untuk Penyusunan Kegiatan.

Guna mewujudkan kinerja yang optimal dan memenuhi target yang telah ditetapkan, sejumlah catatan perlu mendapat perhatian diantaranya :

1. IK Dengan Target Kinerja Tahunan

Indikator Kinerja yang memiliki target triwulanan maupun tahunan tetap harus dimonitor perkembangan pelaksanaan kegiatannya. Penanggung jawab IK agar memastikan bahwa capaian akhir tahun dapat dicapai dengan baik sesuai target yang telah ditetapkan. terutama terkait IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang

Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRSEKP (%) untuk dapat segera dilakukan percepatan penyelesaian tindak lanjut temuan.

2. Verifikasi Capaian

Dalam rangka akuntabilitas atas capaian IK, kegiatan verifikasi perlu dilakukan secara berkala guna memastikan bahwa capaian yang diklaim sesuai bukti dukung yang ada. Disamping itu, verifikasi penting dilaksanakan agar pengukuran dan pelaporan kinerja dapat dilakukan secara disiplin dan tepat waktu.

3. Pelaporan Kinerja

Dalam rangka akuntabilitas atas implementasi SAKIP, kegiatan penyusunan laporan kinerja perlu disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dimana harus terdapat unsur perbandingan antar satker sejenis K/L dan sebagai tindak lanjut rekomendasi atas penilaian SAKIP ditahun sebelumnya, dengan memastikan tim pengelola/penyusun laporan kinerja untuk menyajikan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level kementerian/level unit kerja lingkup BPPSDMKP pada laporan kinerja tahunan.

LAMPIRAN



Perjanjian Kinerja



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAM www.kkp.go.id SUREL bppsdm@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **A. Rita Tisiana Dwi K**
Jabatan : Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **I Nyoman Radiarta**
Jabatan : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 27 Desember 2023

Pihak Kedua
Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan


I Nyoman Radiarta

Pihak Pertama
Kepala Balai Besar Riset Sosial
Ekonomi Kelautan dan Perikanan


A. Rita Tisiana Dwi Kuswardani

Lembar Pengesahan	
Sekretaris BRSDMKP	
Ketua Tim Kerja BBRSEKP	

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Tersedianya Perumusan Kebijakan KP yang digunakan untuk Penyusunan Kegiatan	1	Hasil Perumusan Kebijakan Responsif KP yang digunakan untuk Penyusunan Kebijakan (Rekomenjak)	8
2	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	2	Indeks Profesional ASN Lingkup BBRSEKP (Indeks)	80
		3	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM BBRSEKP (%)	85
		4	Persentase Dokumen Bahan Pimpinan yang Dimanfaatkan (%)	100
		5	Persentase Efektifitas penyebarluasan informasi kegiatan Sosial Ekonomi KP (%)	90,5
		6	Kerjasama Eselon I yang ditindaklanjuti oleh BBRSEKP (Paket)	3
		7	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar BBRSEKP (%)	94
		8	Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja BBRSEKP (Inovasi)	1
		9	Persepsi Kepuasan Layanan Publik Sosial Ekonomi KP (Nilai)	88
		10	Nilai IKPA BBRSEKP (Nilai)	93,76
		11	Nilai Kinerja Anggaran BBRSEKP (Nilai)	82
		12	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Balai Besar Riset Sosial Ekonomi KP (Nilai)	94
		13	Penilaian Mandiri SAKIP BBRSEKP (Nilai)	81
		14	Persentase Realisasi Anggaran BBRSEKP (%)	98
		15	Batas Tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BBRSEKP (%)	≤ 0,5
		16	Jurnal Sosial Ekonomi yang Ter-reakreditasi (Indeks Jurnal)	1
		17	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRSEKP (%)	82
		18	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Mempertahankan Predikat WBK/WBBM yang lolos Penilaian Menuju Wilayah Bebas Korupsi (Nilai)	85

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	19 Persentase Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BBRSEKP (%)	77,8
	20 Layanan Perkantoran BBRSEKP (%)	100

Data Anggaran

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Analisis Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*	1.000.000.000
2.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	11.300.000.000
Total Anggaran Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan		12.300.000.000

Catatan:

*Blokir

Jakarta, 27 Desember 2023

Pihak Kedua
Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan


I Nyoman Radiarta

Pihak Pertama
Kepala Balai Besar Riset Sosial
Ekonomi Kelautan dan Perikanan


A. Rita Tisiana Dwi Kuswardani

Lembar Pengesahan	
 Sekretaris BRSDMKP	
Ketua Tim Kerja BBRSEKP	



Kementerian Kelautan dan Perikanan
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan
Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
2024